

**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA )  
TAHUN 2025-2029**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KOTA BEKASI  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN**  
**PERSANDIAN**

Jalan Lap. Bekasi Tengah No.2 Margahayu, Bekasi Timur, Kode Pos 17113  
B E K A S I

---

***Kata Pengantar***

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Allah SWT., yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada Kita Semua. Dan tak lupa mengucapkan Alhamdulillah, Kami Tim Penyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota telah menyelesaikan Pekerjaan dalam Rangka Penyusunan RENSTRA Tahun 2025-2029.

RENSTRA sebagai Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang diimplementasinya oleh Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (*Diskominfostandi*) Kota Bekasi, dalam kurun Waktu 5 (*lima*) Tahun sehingga dapat mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, dengan Visi Kota Bekasi yaitu : **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**.

Demikian RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 telah tersusun, dan tak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua Pihak yang telah membantu tersusunnya RENSTRA ini.

Bekasi, 19 September 2025

Ketua Tim Penyusun Renstra



**Drs. Nadih Arifin, M.Si.**

## DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar</i> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISKOMINFOSTANDI KOTA BEKASI</b> .....	12
2.1 Gambaran Pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi .....	12
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Diskominfostandi Kota Bekasi	36
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	47
3.1 Tujuan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025- 2029.....	47
3.2 Sasaran RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025- 2029 .....	52
3.3 Strategi Diskominfostandi Kota Bekasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029.....	60
3.4 Arah Kebijakan Diskominfostandi Kota Bekasi dalam mencapai RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 .....	61
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	63
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Diskominfostandi Kota Bekasi .....	63
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Diskominfostandi Kota Bekasi.....	120
4.3 Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Diskominfostandi Kota Bekasi dengan Asta Cita dan Jabar Istimewa .....	125
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	128

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2030 PD Pengampu Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika .....	2
Tabel I.2	Program Dukungan Kota Bekasi Terhadap Asta Cita PD Pengampu Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika .....	2
Tabel I.3	Program Dukungan Kota Bekasi Terhadap Jabar Istimewa PD Pengampu Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika .....	3
Tabel II.1	Pegawai Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025 .....	16
Tabel II.2	Pegawai Diskominfostandi Kota Bekasi Berdasarkan Golongan/Pangkat Tahun 2025 .....	17
Tabel II.3	Jumlah Pejabat Eselon pada Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025 .....	17
Tabel II.4	Pegawai Diskominfostandi Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2025 .....	17
Tabel II.5	Rekapitulasi Jumlah ASN Dilingkungan Diskominfostandi Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan dan Golongan Tahun 2025 .....	19
Tabel II.6	Sarana dan Prasarana Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025 .....	20
Tabel II.7	Sarana Informasi Dalam Pelayanan Publik .....	22
Tabel II.8	Capaian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024 .....	24
Tabel II.9	Rincian Hasil Evaluasi Diskominfostandi Kota Bekasi .....	26
Tabel II.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi .....	27
Tabel II.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Diskominfostandi Kota Bekasi .....	28

Tabel II.12	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan .....	31
Tabel II.13	Dukungan Kelurahan di Wilayah Kota Bekasi .....	32
Tabel II.14	Dukungan Pusat Kesehatan Masyarakat ( <i>Puskesmas</i> ) di Wilayah Kota Bekasi .....	34
Tabel II.15	Identifikasi Masalah .....	37
Tabel II.16	Isu Strategis Diskominfostandi Kota Bekasi .....	45
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 .....	51
Tabel III.2	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 .....	53
Tabel III.3	Formulasi Perhitungan IKU Diskominfostandi Kota Bekasi .....	55
Tabel III.4	Penahapan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi .....	60
Tabel III.5	Arah Kebijakan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi .....	62
Tabel IV.1	Pemuthahiran pada Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Diskominfostandi Kota Bekasi .....	64
Tabel IV.2	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Diskominfostandi Kota Bekasi .....	81
Tabel IV.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Diskominfostandi Kota Bekasi .....	87
Tabel IV.4	Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	113
Tabel IV.5	Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Pencapaian Jabar Istimewa .....	114
Tabel IV.6	Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Pencapaian Asta Cita .....	115
Tabel IV.7	Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Penanggulangan Kemiskinan .....	118
Tabel IV.8	Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Penanganan Stunting .....	119

Tabel IV.9	Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 .....	121
Tabel IV.10	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Bekasi .....	122
Tabel IV.11	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 .....	124
Tabel IV.12	Relevansi dan Konsistensi antar Tujuan dan Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi .....	125
Tabel IV.13	Program Dukungan Kota Bekasi terhadap Pencapaian Asta Cita .....	125
Tabel IV.14	Program Dukungan Kota Bekasi terhadap Pencapaian Jabar Istimewa .....	127

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi, sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi.

Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan-layanan pemerintah kepada publik.

Selaras dengan hal tersebut, Rencana Strategis (*RENSTRA*) Perangkat Daerah merupakan Dokumen Rencana Strategik untuk Jangka Menengah yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan sebagai Tolak Ukur Pengendalian dan Evaluasi Capaian Perangkat Daerah dalam mewujudkan Visi, melaksanakan Misi dan Program Kepala Daerah dan sebagai Bahan Perumusan Rancangan Rencana Kerja (*RENJA*) Perangkat Daerah yang berpedomanan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*). *RENSTRA* ini disusun untuk menggambarkan Wujud Pelayanan Perangkat Daerah sesuai Tugas dan Fungsi selama 5 (*lima*) Tahun Periode.

Dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2030 Diskominfostandi Kota Bekasi berperan seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel I.1**  
**Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bekasi**  
**Tahun 2025-2030**  
**PD Pengampu Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika**

Program Prioritas Kota Bekasi	PD Pengampu Bidang Urusan
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Komunikasi dan Informatika

Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Dalam Program Dukungan Kota Bekasi terhadap Pencapaian Asta Cita, Diskominfostandi Kota Bekasi berperan seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel I.2**  
**Program Dukungan Kota Bekasi**  
**Terhadap Asta Cita**  
**PD Pengampu Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika**

Kegiatan Prioritas Utama/Proyek Strategis Nasional	Program Kota Bekasi	PD Pengampu Bidang Urusan
<b>Kegiatan Prioritas Utama</b>		
<b>PN 1</b>		
Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Komunikasi dan Informatika
<b>PN 2</b>		
Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika
<b>PN 3</b>		
Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika
<b>PN 4</b>		
Tidak ada Program yang relevan		
<b>PN 5</b>		
Tidak ada Program yang relevan		
<b>PN 6</b>		
Tidak ada Program yang relevan		
<b>PN 7</b>		
Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika
<b>PN 8</b>		
Tidak ada Program yang relevan		

Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Dalam Program Dukungan Kota Bekasi terhadap Pencapaian Jabar Istimewa, Diskominfostandi Kota Bekasi berperan seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel I.3**  
**Program Dukungan Kota Bekasi**  
**Terhadap JABAR Istimewa**  
**PD Pengampu Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika**

JABAR Istimewa	Program Kota Bekasi	PD Pengampu Bidang Urusan
Penyelenggaraan Pemerintahan Istimewa (birokrasi jujur, bersih, dan melayani)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh PD
Ekonomi dan Tata Ruang Istimewa (lapangan kerja baru, investasi, pariwisata, ekonomi kreatif, smart city)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika

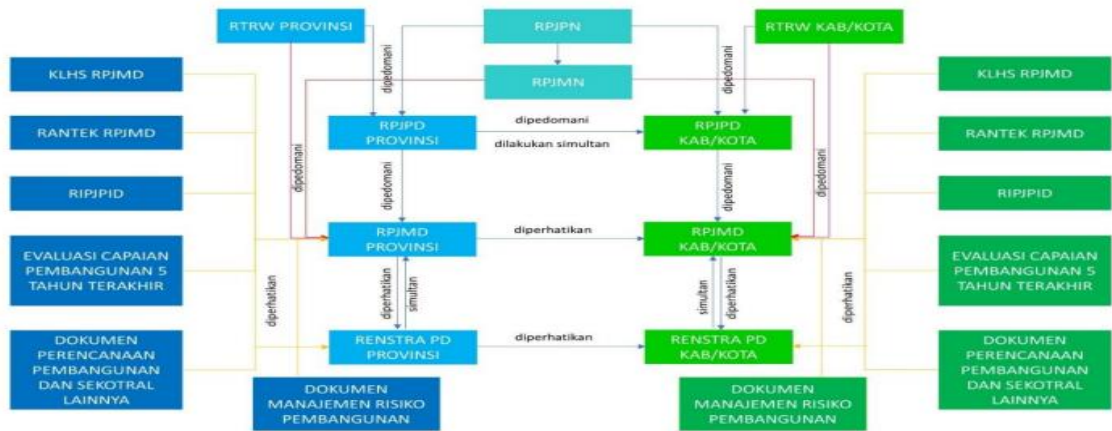
Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Diskominfostandi Kota Bekasi berupaya untuk memberikan Layanan-layanan Informasi berupa Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Perangkat Daerah di Pemerintahan Kota Bekasi serta Layanan Informasi Komunikasi Publik bagi masyarakat kota Bekasi yang terdiri dari perempuan, laki-laki dan kelompok rentan di Kota Bekasi. Sehingga pada proses Penyusunan RENSTRA ini memerlukan keterlibatan dari seluruh *elemen* yang terkait dan berkepentingan dengan Organisasi baik dari *Internal* maupun *Eksternal* Organisasi.

Memperhatikan perencanaan sebagai alat *manajerial* untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga, Penyusunan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi telah dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan RENSTRA, Rancangan Akhir RENSTRA hingga penetapan RENSTRA.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan RENSTRA di Kota Bekasi mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana dalam Gambar

di bawah ini :



**Gambar I.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor lainnya**

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Diskominfostandi Kota Bekasi mendukung dan menjalankan Misi Kota Bekasi yang ke-5 (**Misi-5**) yaitu **“Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren”**.

Untuk dapat mewujudkan **Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera** seperti yang di cita-citakan pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 perlu adanya dukungan pembangunan yang handal. Oleh karena itu, Diskominfostandi Kota Bekasi menyelenggarakan pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Dari uraian tugas pokok tersebut, berarti Diskominfostandi Kota Bekasi bertanggung jawab terhadap Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian untuk Masyarakat di Kota Bekasi. Sebagai upaya untuk mengimplementasikan hal-hal diatas, maka perlu menyusun RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi yang dikenal dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Periode 2025-2029. Semoga dengan disusunnya RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini, diharapkan dapat memberikan layanan-

layanan Informasi berupa Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi serta Layanan Informasi dan Komunikasi Publik bagi masyarakat Kota Bekasi yang terdiri dari perempuan, laki-laki dan kelompok rentan di Kota Bekasi.

Dalam Penyusunan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Bekasi dan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RENSTRA Kementerian Komunikasi dan Digital, yaitu arah kebijakan Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025-2029 akan berfokus pada penciptaan ruang digital yang aman, inklusif, dan memberdayakan. Hal ini akan didukung dengan aturan yang jelas, penerapan sanksi yang bertahap bagi penyelenggara sistem elektronik yang melanggar, serta pengawasan yang ketat melalui sistem moderasi konten. Selain itu, Komdigi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang digital.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Peraturan Perundangan yang menjadi Landasan Hukum disusunnya RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

- Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat;
  10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
  20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025

- adalah instruksi mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informasi;
  24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
  25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
33. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
39. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi;
40. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi;
41. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
42. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
43. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044;
  44. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045;
  45. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
  46. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;
  47. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud Penyusunan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi sebagai sebuah Dokumen Rencana yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah setiap Tahun selama 5 (*lima*) Tahun, yang akan digunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja (*RENJA*) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (*RKA*).

#### **b. Tujuan**

1. Mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Khususnya Urusan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah dalam Rangka menunjang Pencapaian Visi dan Misi Daerah;

3. Memantapkan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebagai Wujud Pertanggungjawaban dalam Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan;
4. Menjadi Pedoman bagi Penyusunan RENJA dan RKA Diskominfostandi Kota Bekasi dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
5. Untuk menjamin adanya Konsistensi Perencanaan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun dengan Sistematika sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut :

##### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan terkait latar belakang penyusunan, dasar hukum yang digunakan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyajian.

##### **Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISKOMINFOSTANDI KOTA BEKASI**

Bab ini berisi penjelasan terkait gambaran pelayanan, permasalahan serta isu strategi Diskominfostandi Kota Bekasi.

##### **Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Diskominfostandi Kota Bekasi.

##### **Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah, dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran

Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Diskominfostandi Kota Bekasi.

## Bab V PENUTUP

Berisi memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISKOMINFOSTANDI KOTA BEKASI**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Diskominfostandi Kota Bekasi**

###### **a. Tugas**

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, Diskominfostandi Kota Bekasi memiliki Tugas yaitu Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.

###### **b. Fungsi**

Selanjutnya dalam rangka menjalankan Tugas tersebut maka Diskominfostandi Kota Bekasi memiliki Fungsi sebagai berikut :

- a) Penetapan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Lingkup Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b) Pemberian Pelayanan dan Pembinaan kepada Unsur terkait di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, serta Pelaksanaan Hubungan Kerjasama dengan Perangkat Daerah, Lembaga atau Instansi terkait dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Dinas.

###### **c. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan

Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi terdiri atas :

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Fungsi Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Persandian, Teknologi Informasi dan Komunikasi, *e-Government* serta Statistik dan jabatan fungsional.

b) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Memimpin dan Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis Administratif Kegiatan dan Ketatausahaan yang meliputi Urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai Tata Kelola Kesekretariatan yang Baik. Sekretariat membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan.

c) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Pengelolaan Informasi Publik, Strategi Komunikasi Publik serta Layanan Komunikasi dan Informasi Publik untuk mencapai Pelaksanaan Teknis Urusan di Bidanganya.

d) Bidang Persandian, Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Persandian, Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Persandian, Keamanan Informasi, Infrastruktur Jaringan TIK dan

Telekomunikasi, serta Infrastruktur Layanan *Data Centre* untuk mencapai Pelaksanaan Teknis Urusan di Bidangny.

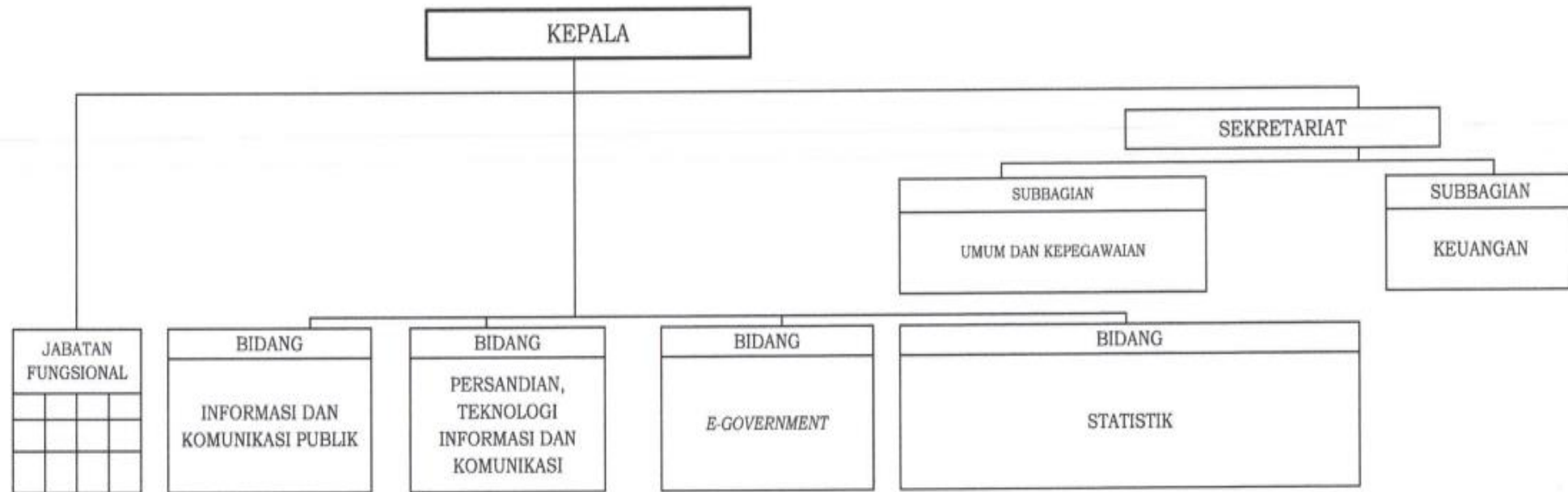
e) Bidang *e-Government*

Bidang *e-Government* mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi, Pengembangan *e-Government* serta Tata Kelola *e-Government* untuk mencapai Pelaksanaan Teknis Urusan di Bidangny.

f) Bidang Statistik

Bidang Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Statistik Sektor I dan Statistik Sektor II untuk mencapai Pelaksanaan Teknis Urusan di Bidangny.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**



**Gambar II.1 Bagan Sturuktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi**  
*Sumber : Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2024*

## 2.1.2 Sumber Daya Diskominfostandi Kota Bekasi

Sumber Daya yang dimiliki Diskominfostandi Kota Bekasi, meliputi :

### a. Aparatur

Dalam menunjang Pelaksanaan Kegiatan, Diskominfostandi Kota Bekasi memiliki Pegawai sebanyak 91 (*sembilan puluh satu*) Pegawai yang terdiri dari Pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 44 (*empat puluh empat*) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 45 (*empat puluh lima*) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai berstatus Tenaga Kontrak Kerja (TKK) berjumlah 2 (*dua*) Pegawai.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Pegawai Diskominfostandi Kota Bekasi dibawah ini :

**Tabel II.2**  
**Pegawai Diskominfostandi Kota Bekasi**  
**Tahun 2025**

No	Unit Kerja	PNS	PPPK	TKK	CPNS	Jumlah
1	Sekretariat	11	9	-	-	<b>20</b>
2	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	9	17	1	-	<b>27</b>
3	Bidang Persandian, Teknologi Informasi dan Komunikasi	11	9	1	-	<b>21</b>
4	Bidang <i>E-Government</i>	8	6	-	-	<b>14</b>
5	Bidang Statistik	5	4	-	-	<b>9</b>
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>91</b>

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfostandi Kota Bekasi

Untuk Pegawai yang sesuai dengan Tingkat Golongan Pegawai yang berada di Lingkungan Diskominfostandi Kota Bekasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**Tabel II.3**  
**Pegawai Diskominfostandi Kota Bekasi**  
**Berdasarkan Golongan / Pangkat**  
**Tahun 2025**

No	Unit Kerja	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1	Sekretariat	-	-	8	3	<b>11</b>
2	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	6	3	<b>9</b>
3	Bidang Persandian, Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	9	2	<b>11</b>
4	Bidang E-Government	-	-	7	1	<b>8</b>
5	Bidang Statistik	-	-	4	1	<b>5</b>
6	CPNS	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>44</b>

*Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfostandi Kota Bekasi*

**Tabel II.4**  
**Jumlah Pejabat Eselon pada Diskominfostandi Kota Bekasi**  
**Tahun 2025**

No	Esselonering	Jumlah
1	Eselon II b	1
2	Eselon III a	-
3	Eselon III b	4
4	Eselon IV a	2
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

*Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfostandi Kota Bekasi*

**Tabel II.5**  
**Pegawai Diskominfostandi Kota Bekasi**  
**Berdasarkan Pendidikan Terakhir**  
**Tahun 2025**

No	Pendidikan Terakhir	PNS	PPPK	TKK	CPNS
1	Magister Sosiologi	1	-	-	-
2	Magister Manajemen	4	-	-	-
3	Magister Manajemen Sistem Informasi	1	-	-	-

No	Pendidikan Terakhir	PNS	PPPK	TKK	CPNS
4	Magister Ilmu Administrasi / M. Si	9	-	-	-
5	Magister Administrasi Publik	1	-	-	-
6	Sarjana Hukum	-	2	1	-
7	Sarjana Sistem Informasi	3	6	-	-
8	Sarjana Administrasi Negara	3	6	-	-
9	Sarjana Ekonomi	1	-	-	-
10	Sarjana Teknik Informatika	7	5	-	-
11	Sarjana Manajemen	1	3	-	-
12	Sarjana Ilmu Hukum Tata Pemerintahan	1	-	-	-
13	Sarjana Teknik Elektro	2	-	-	-
14	Farmasi Apoteker	1	-	-	-
15	Sarjana Psikologi	-	1	-	-
16	Sarjana Ilmu Komunikasi	-	1	-	-
17	Sarjana Komputer Manajemen Informatika	1	1	-	-
18	Sarjana Ilmu Komputer	1	-	-	-
19	Sarjana Teknik Informatika Komputer	1	-	-	-
20	Sarjana Matematika	-	1	-	-
21	Sarjana Pendidikan	-	2	-	-
22	Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota	-	1	-	-
23	Sarjana Administrasi Publik	1	-	-	-
24	D4 Sistem Informasi	-	1	-	-
25	D4 Ilmu Pemerintahan	1	-	-	-
26	D3 ( Akuntansi)	1	-	-	-
27	D3 (Teknik Komputer)	-	1	-	-
28	D3 (Manajemen Informatika)	-	3	-	-
29	D3 (Teknik Elektro)	-	1	-	-
30	SMK	-	6	-	-
31	SMA	3	4	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfoandi Kota Bekasi

**Tabel II.6**  
**Rekapitulasi Jumlah ASN Dilingkungan Diskominfostandi Kota Bekasi**  
**Berdasarkan Pendidikan dan Golongan**  
**Tahun 2025**

No	Unit Organisasi	Data Kepegawaian																												
		Menurut Tingkat Pendidikan											Menurut Golongan																	
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S.1	S.2	S.3	JML	I				II				III				IV					JML
a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	JML													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2	Sekretaris Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Subag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
4	Subag Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
5	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
6	Kepala Bidang Persandian, Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
7	Kepala Bidang EGovernment	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
8	Kepala Bidang Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
9	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	13	10	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	2	8	5	-	-	-	-	23
10	Pelaksana	-	-	3	-	-	1	1	8	1	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	3	3	-	-	-	-	-	14
11	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	-	<b>44</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	-	<b>1</b>	-	-	<b>44</b>

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfostandi Kota Bekasi

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia telah memenuhi Syarat ataupun Klasifikasi yang sudah ditentukan sebagai Standarisasi Tingkat Pendidikan ASN di Kota Bekasi.

Secara Kuantitas Pegawai Diskominfostandi Kota Bekasi sudah cukup memadai untuk mendukung Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi, namun secara Kualitas masih diperlukan beberapa orang tambahan yang mempunyai Keahlian Khusus dan Kualifikasi Pendidikan Teknologi Informatika (*IT*) dan tidak adanya Fungsional Perencanaan untuk menciptakan *Inovasi* terbaru yang bermanfaat untuk Masyarakat Kota Bekasi.

#### **b. Sarana dan Prasarana**

Dalam menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Diskominfostandi Kota Bekasi memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

**Tabel II.7**  
**Sarana dan Prasarana Diskominfostandi Kota Bekasi**  
**Tahun 2025**

No.	Barang	Banyaknya	Kondisi
			Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat / Belum Ada
1	Personal Komputer	88 Unit	Baik
2	Printer	38 Unit	Baik
3	Laptop / Notebook	33 Unit	Baik
4	Scanner	3 Unit	Baik
5	Finger Print	1 Unit	Baik
6	Mesin Facsimile	2 Unit	Baik
7	Handphone	7 Unit	Baik
8	Mesin Ketik Elektronik	2 Unit	Baik
9	Alat Penghancur Kertas	2 Unit	Baik
10	Hand Pallet Small 3T	1 Unit	Baik
11	Krisbow Pallet Plastic 1.5T	1 Unit	Baik
12	Lemari Besi	14 Unit	Baik
13	Lemari Besi Kaca	6 Unit	Baik
14	Lemari Pakaian Kayu	1 Unit	Baik
15	Filing Kabinet	13 Unit	Baik
16	Rak Besi Siku	4 Unit	Baik
17	Lemari Loker	21 Unit	Baik
18	Pesawat Telephon	2 Unit	Baik

No.	Barang	Banyaknya	Kondisi
			Baik / Rusak Ringan / Rusak Berat / Belum Ada
19	Kulkas	2 Unit	Baik
20	Dispenser	2 Unit	Baik
21	Video Drone	1 Unit	Baik
22	LCD Proyektor / Infocus	1 Unit	Baik
23	AC Split	34 Unit	Baik
24	AC Window	8 Unit	Baik
25	AC Casset AC Casset 3 PK	Unit	Baik
26	Meja Kerja Pimpinan / Kadis	1 Unit	Baik
27	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5 Unit	Baik
28	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	16 Unit	Baik
29	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	70 Unit	Baik
30	Meja Rapat	2 Unit	Baik
31	Meja Pantry	1 Unit	Baik
32	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2 Unit	Baik
33	Kursi Kerja Pimpinan / Kadis	1 Unit	Baik
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Unit	Baik
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16 Unit	Baik
36	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	68 Unit	Baik
37	Kursi Rapat	73 Unit	Baik
38	Kursi Biasa (Kursi Makan/Serbaguna)	10 Unit	Baik
39	Sofa	6 Unit	Baik
40	Unitemuptible Power Supply (UPS)	3 Unit	Baik
41	TV Display	4 Unit	Baik
42	Jam Mekanis (jam Dinding)	2 Unit	Baik
43	Sound System	2 Unit	Baik
44	Genset	1 Unit	Baik
45	Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat	10 Unit	1 Unit Rusak Berat
46	Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua	7 Unit	Baik
47	Tanggal Alumunium	2 Unit	Baik
48	Kichen Set	1 Unit	Baik
49	Kompom Listrik	1 Unit	Baik
50	APAR (Alat Pemadam Kebakaran)	4 Unit	Baik
51	Bracket standing	1 Unit	Baik
52	Camcorder	1 Unit	Baik
53	Kamera	3 Unit	Baik
54	Digital Voice Recorder/Voice Recorder	2 Unit	Baik
55	Mic Delegate	10 Unit	Baik

Sumber Data : Aplikasi SIMDA BMD (ATISISBADA) Pemerintah Kota Bekasi

### c. Sarana Informasi dalam Pelayanan Publik

Dalam rangka kemudahan Informasi dan Komunikasi Publik maka Diskominfostandi Kota Bekasi telah membuka Jalur Komunikasi Publik, sebagai berikut :

**Tabel II.8**  
**Sarana Informasi Dalam Pelayanan Publik**

1.	Fitur Tanya Jawab pada kota bekasi - SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> - Call Center NTPD 112 - LPID : <a href="http://ppid.bekasikota.go.id">ppid.bekasikota.go.id</a>
2.	Manajemen email : <a href="mailto:opd.diskominfostandi@bekasikota.go.id">opd.diskominfostandi@bekasikota.go.id</a>
3.	Website : <a href="http://diskominfo.bekasikota.go.id">diskominfo.bekasikota.go.id</a>
4.	Twitter : @KominfoBekasi
5.	Instagram : <a href="https://www.instagram.com/diskominfobekasi">diskominfobekasi</a>
6.	<a href="mailto:csirt@bekasikota.go.id">csirt@bekasikota.go.id</a>

Sumber Data : Diskominfostandi Kota Bekasi

#### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi

Kinerja (*Performance*) adalah Gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Pelaksanaan suatu Kegiatan / Program / Kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Organisasi yang tertuang dalam *Strategic Planning* suatu Organisasi. Sementara Pengukuran Kinerja (*Performance Measurement*) adalah suatu Proses Penilaian Kemajuan Pekerjaan terhadap Tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk menganalisis Kinerja Pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024 digunakan Indikator Sasaran (*Indikator Kinerja Utama*), dengan metode perhitungan di bawah ini :

**Indeks Layanan Publik Berbasis IT** = {Nilai Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital + Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik + Nilai Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital + Nilai Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi} : 4

**Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital**

Nilai Rataan{(Cakupan Unit Kerja Yang Terkoneksi Dengan Jaringan Primer + Cakupan Layanan Informasi Pemerintahan Daerah Kepada Publik + Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Pusat Data) + Persentase Jumlah platform dengan database yang terintegrasi + Persentase Jumlah Layanan Digital PD)} x 5 ( indeks)

**Cakupan Unit Kerja Yang Terkoneksi Dengan Jaringan Primer**

= (Jumlah jaringan FO (internet) yang terbangun pada SD Negeri se Kota Bekasi + Penyediaan Jaringan FO (Intranet) Kecamatan Kelurahan, SMPN dan Puskesmas se-Kota Bekasi + Pengelolaan jaringan TIK Pemkot Bekasi)/4

**Cakupan Layanan Informasi Pemerintahan Daerah Kepada Publik**

= Jumlah free wifi di lingkungan pemerintah kota bekasi dan ruang publik/total jumlah freewifi di lingkungan pemerintah kota bekasi dan ruang public

**Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Pusat Data**

= Jumlah uptime (waktu hidup) layanan pusat data/waktu setahun + Jumlah uptime (Triwulan 1 +Triwulan2+Triwulan III+Triwulan IV)/4

**Persentase Jumlah platform dengan database yang terintegrasi**

= Jumlah platform dengan Database yang terintegrasi /jumlah pd

**Persentase Jumlah Layanan Digital PD**

= Jumlah layanan digital PD/Jumlah PD

**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik**

Nilai Rataan Survei IKM (PermenPAN RB) yang dilakukan Persemester dalam 1 Tahun Anggaran x (5 Indeks)

**Nilai Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital**

=  $\frac{\text{Jumlah Data Sektoral pada PD Berbasis Digital}}{\text{Jumlah Seluruh Data Sektoral Pada PD}} \times 100 \% \times 5$  (Indeks)

**Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi**

{(Persentase persentase penyediaan layanan keamanan informasi x 0,4)+ Persentase pelaksanaan keamanan informasi x 0,3) + Persentase penyelenggaraan jaring komunikasi standi dan pemenuhan alat pendukung dan utama persandian x 0,3):100}5 indeks

= **Persentase persentase penyediaan layanan keamanan informasi** (Jumlah pengukuran tingkat kematangan informasi + Jumlah Audit Reviuw Standarisasi ISO + Jumlah sertifikasi ISO + Jumlah Infrastruktur Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan fasilitas teknologi keamanan informasi +Jumlah insiden Keamanan Informasi yang dapat ditanggulangi dan dipulihkan ) + **Persentase pelaksanaan keamanan informasi** (Jumlah pengamanan sinyal + Jumlah aparatur yang menerbitkan sertifikasi elektronik + Jumlah aplikasi yang akan menggunakan sertifikasi elektronik(tanda tangan elektronik) ) + **Persentase penyelenggaraan jaring komunikasi standi dan pemenuhan alat pendukung dan utama persandian** = 100%

Pada Tahun 2024 Diskominfostandi Kota Bekasi memiliki 2 (dua) Sasaran yang harus diwujudkan yaitu *Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (Digital Government Pemerintah Kota Bekasi)*, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi IKU dan Sasaran kedua yaitu *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi*, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi IKU, sebagai berikut :

**Tabel II.8**  
**Capaian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024**

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2024			
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik ( <i>Digital Government Pemerintah Kota Bekasi</i> )	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	Indeks (Nilai)	4,09	4,41	107,82%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( <i>AKIP</i> ) Diskominfostandi	Nilai	77,50	80,67	104,09%

Sumber Data : Diskominfostandi Kota Bekasi

Secara umum pada Tahun 2024 sesuai tabel di atas bahwa 2 (dua) Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi melampaui Target yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* diperoleh sebesar 107,82% melampaui Target yang ditetapkan dan Capaian Kinerja *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi* diperoleh sebesar 104,09% melampaui Target yang ditetapkan.

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Target *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* Tahun 2024 sebesar 4,09 dengan Realisasi 4,41 maka Capaian Kinerja Tahun 2024 untuk

Indeks Layanan Publik Berbasis IT sebesar 107,82%, maka capaian atas *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* **telah terlampaui**.

Adapun Faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* yang meningkat antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan Integrasi Database Perangkat Daerah dan Pemeliharaan Layanan Digital Perangkat Daerah;
2. Telah Terbangunnya Cakupan Unit Kerja yang Terkoneksi dengan Jaringan Primer sesuai dengan Target;
3. Telah Terpenuhinya *Uptime (Waktu Hidup)* Layanan Infrastruktur Pusat Data dan Pengelolaan Pusat Data yang berkelanjutan;
4. Telah dilaksanakannya IT Security Assesment pada website 16 (*enam belas*) Perangkat Daerah;
5. Operasional, Pemantauan dan Konfigurasi Aset, Pemeliharaan, Perangkat Penunjang, Pemantauan Lingkungan, Penambahan kapasitas UPS, Penggantian perangkat monitoring dan konfigurasi, power distribution unit, penambahan kapasitas dan monev DRC dan Peningkatan Kapabilitas;
6. Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi serta Penerbitan Sertifikat Elektronik bagi aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi Tahun 2024 sebesar 77,50 dengan Realisasi 80,67, maka Capaian Kinerja Tahun 2024 atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi sebesar 104,09%, maka Capaian atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi **tercapai**.

Rincian Komponen yang dinilai pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel II.9**  
**Rincian Hasil Evaluasi**  
**Diskominfostandi Kota Bekasi**  
**Tahun 2024**

No	Komponen yang Dinilai	Nilai Akhir	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,14
2	Pengukuran Kinerja	30	23,99
3	Pelaporan Kinerja	15	12,87
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	17,67
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>80,67</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>A</b>

*Sumber : Data Hasil LHE SAKIP dari Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2024*

Pencapaian Pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi selain mengacu kepada Perubahan RPMD Kota Bekasi 2018-2023 (*Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2023*), RPD Kota Bekasi 2024-2026 juga mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*IKU*) Diskominfostandi Kota Bekasi yang dapat dilihat pada Tabel II.10, sebagai berikut :

**Tabel II.10**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	-	-	IKU	2,33	3,99	4,35	4,84	4,09	2,45	4,01	4,45	4,86	4,41	105%	101%	102%	100,4%	107,82%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfostandi	-	-	IKU	-	84,80	86,77	88,80	-	-	84,45	91,46	89,69	-	-	99,59%	106%	101%	-
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	-	IKU	-	81,17	82,79	84,44	77,50	-	76,06	76,12	79,04	80,67	-	93,70%	92%	93,6%	104,09%

Sumber Data : LKIP 2021-2024 Diskominfostandi Kota Bekasi

Adapun untuk Pendanaan Anggaran dan Realisasi Diskominfo Standi Kota Bekasi pertahun, dalam Tabel II.11 tersaji Anggaran dan Realisasi selama 5 (*lima*) Tahun sebagai Pencapaian Kinerja Diskominfo Standi Kota Bekasi yakni antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel II.11, sebagai berikut :

**Tabel II.11**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Diskominfo Standi Kota Bekasi**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Belanja Operasi dan Belanja Modal	Rp.22.227.726.200	Rp.29.930.347.940	Rp.35.523.691.840	Rp.35.414.785.081	Rp.40.861.988.050	Rp.20.321.861.115	Rp.27.592.651.075	Rp.33.139.056.770	Rp.32.452.312.365	Rp.38.275.823.920	91,43 %	92,19 %	93,29 %	91,63 %	93,67 %

Sumber Data : Aplikasi [simplibang.bekasikota.go.id](http://simplibang.bekasikota.go.id)

Pengukuran Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi dilakukan terhadap Capaian Indikator Kinerja Sasaran. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2023 sebagaimana dalam Tabel di atas dapat dijelaskan, diantaranya yaitu :

- Indeks Layanan Publik Berbasis IT, Realisasinya sebesar 4,86 melebihi Target yang ditetapkan sebesar 4,84 meningkat dengan Tingkat Capaiannya sebesar 100,4%;
- Indeks (*Nilai*) Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik, Realisasinya sebesar 89,69 melebihi Target yang ditetapkan sebesar 88,80 meningkat dengan Tingkat Capaiannya sebesar 101%;
- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*AKIP*) Diskominfostandi, Realisasinya sebesar 79,04 **belum mencapai** Target yang ditetapkan sebesar 84,44 dengan Tingkat Capaian sebesar 93,6%.

Diskominfostandi Kota Bekasi pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 untuk Belanja Langsung Urusan (*BLU*) terdapat 4 (*empat*) Program, 5 (*lima*) Kegiatan dan 19 (*sembilan belas*) yang mendukung Pencapaian Indikator Sasaran *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* di Diskominfostandi Kota Bekasi dengan *Outcome* yang Terlampaui dan Tercapai dengan adanya Efisiensi Anggaran. Hal tersebut disebabkan karena Diskominfostandi Kota Bekasi melakukan beberapa upaya Efisiensi Sumber Daya untuk mencapai Indikator Sasaran Strategis *Indeks Layanan Publik Berbasis IT*.

Sedangkan Belanja Langsung Penunjang Urusan (*BLPU*) pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 terdapat 1 (*satu*) Program, 6 (*enam*) Kegiatan dan 19 (*sembilan belas*) Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Indikator Sasaran *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi*.

Untuk mendukung Pencapaian Sasaran sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfostandi Kota Bekasi pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 didukung dengan Anggaran Belanja Langsung Urusan (*BLU*) yang mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.14.519.721.550.- menjadi Rp.14.241.334.031.- serta

untuk menunjang Pelaksanaan Kinerja didukung dengan Anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan (*BLPU*) yang mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.21.358.120.290.- menjadi Rp.21.173.451.050.-.

Pengukuran Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi dilakukan terhadap Capaian Indikator Kinerja Sasaran. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel di atas dapat dijelaskan, diantaranya yaitu :

- Indeks Layanan Publik Berbasis IT, Realisasinya sebesar 4,41 melebihi Target yang ditetapkan sebesar 4,09 meningkat dengan Tingkat Capaiannya sebesar 107,82%;
- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*AKIP*) Diskominfostandi, Realisasinya sebesar 80,67 melebihi Target yang ditetapkan sebesar 77,50 dengan Tingkat Capaian sebesar 104,09%.

Diskominfostandi Kota Bekasi pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 untuk Belanja Langsung Urusan (*BLU*) terdapat 4 (*empat*) Program, 5 (*lima*) Kegiatan dan 17 (*tujuh belas*) yang mendukung Pencapaian Indikator Sasaran *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* di Diskominfostandi Kota Bekasi dengan *Outcome* yang Terlampaui dan Tercapai dengan adanya Efisiensi Anggaran. Hal tersebut disebabkan karena Diskominfostandi Kota Bekasi melakukan beberapa upaya Efisiensi Sumber Daya untuk mencapai Indikator Sasaran Strategis *Indeks Layanan Publik Berbasis IT*.

Sedangkan Belanja Langsung Penunjang Urusan (*BLPU*) pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 terdapat 1 (*satu*) Program, 7 (*tujuh*) Kegiatan dan 19 (*sembilan belas*) Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Indikator Sasaran *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi*.

Untuk mendukung Pencapaian Sasaran sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfostandi Kota Bekasi pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 didukung dengan Anggaran Belanja Langsung Urusan (*BLU*) yang mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*)

sebesar Rp.24.102.265.650.- menjadi Rp.23.823.909.650.- pada APBD-Perubahan, serta untuk menunjang Pelaksanaan Kinerja didukung dengan Anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) yang mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.16.809.472.400.- menjadi Rp.17.038.078.400.- pada APBD-Perubahan.

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Diskominfostandi Kota Bekasi

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa Kelompok Sasaran Layanan Diskominfostandi Kota Bekasi, sebagai berikut :

##### a. Mitra Perangkat Daerah (PD) dalam Pemberian Pelayanan

Sebanyak 44 (*empat puluh empat*) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi merupakan Mitra Diskominfostandi Kota Bekasi, diantaranya dapat dilihat pada Tabel II.12, sebagai berikut :

**Tabel II.12**  
**Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan**

No.	Mitra Perangkat Daerah
1	Sekretariat Daerah Kota Bekasi
2	Sekretariat DPRD Kota Bekasi
3	Inspektorat Kota Bekasi
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
6	Badan Perencanaan Pembangunan dan penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi
8	Badan pendapatan Daerah Kota Bekasi
9	Badan kepegawaian, Pengembangan, dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bekasi
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi
12	Dinas Pendidikan Kota Bekasi
13	Dinas Kesehatan Kota Bekasi
14	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi
15	Dinas Sosial Kota Bekasi
16	Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
17	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi
18	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
19	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bekasi
21	Dinas Perhubungan Kota Bekasi
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi
24	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi

No.	Mitra Perangkat Daerah
26	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi
27	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
28	Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
30	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi
31	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi
32	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi
33	Kecamatan Bekasi Utara
34	Kecamatan Bekasi Timur
35	Kecamatan Bekasi Selatan
36	Kecamatan Bekasi Barat
37	Kecamatan Rawalumbu
38	Kecamatan Mustikajaya
39	Kecamatan Bantargebang
40	Kecamatan Medan satria
41	Kecamatan Pondokgede
42	Kecamatan Jatiasih
43	Kecamatan Pondokmelati
44	Kecamatan Jatisampurna

Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

**b. Dukungan Kelurahan / Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) / Sekolah Dasar Negeri (SDN) / Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (PD)**

Dukungan 56 (lima puluh enam) Kelurahan di Wilayah Kota Bekasi sebagai Unsur Pemerintahan Kota Bekasi dalam memfasilitasi Jaringan Intra Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja oleh Diskominfostandi Kota Bekasi, diantaranya dapat dilihat pada Tabel II.13, sebagai berikut :

**Tabel II.13**  
**Dukungan Kelurahan di Wilayah Kota Bekasi**

No.	Kelurahan
1	Kel. Bekasijaya
2	Kel. Margahayu
3	Kel. Durenjaya
4	Kel. Arenjaya
5	Kel. Bintara
6	Kel. Kranji
7	Kel. Kotabaru
8	Kel. Bintarajaya
9	Kel. Jakasampurna
10	Kel. Kaliabang Tengah
11	Kel. Perwira
12	Kel. Harapanbaru
13	Kel. Teluk Pucung
14	Kel. Margamulya
15	Kel. Harapanjaya
16	Kel. Pekayonjaya
17	Kel. Margajaya

No.	Kelurahan
18	Kel. Jakamulya
19	Kel. Jakasetia
20	Kel. Kayuringinjaya
21	Kel. Bojong Rawalumbu
22	Kel. Pengasinan
23	Kel. Sepanjangjaya
24	Kel. Bojongmenteng
25	Kel. Medansatria
26	Kel. Harapanmulya
27	Kel. Pejuang
28	Kel. Kalibaru
29	Kel. Bantargebang
30	Kel. Cikiwul
31	Kel. Ciketingudik
32	Kel. Sumurbatu
33	Kel. Jatiwaringin
34	Kel. Jatibening
35	Kel. Jatimakmur
36	Kel. Jatibening Baru
37	Kel. Jaticempaka
38	Kel. Jatimekar
39	Kel. Jantiasih
40	Kel. Jatikramat
41	Kel. Jatirasa
42	Kel. Jatiluhur
43	Kel. Jatisari
44	Kel. Jatisampurna
45	Kel. Jatikarya
46	Kel. Jatiranggon
47	Kel. Jatirangga
48	Kel. Jatiraden
49	Kel. Padurenan
50	Kel. Cimuning
51	Kel. Mustikajaya
52	Kel. Mustikasari
53	Kel. Jatirahayu
54	Kel. Jatiwarna
55	Kel. Jatimelati
56	Kel. Jatimurni

Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

Dukungan 51 (*lima puluh satu*) Pusat Kesehatan Masyarakat (*Puskesmas*) di Wilayah Kota Bekasi sebagai Unsur Pemerintahan Kota Bekasi dalam memfasilitasi Jaringan Intra Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja oleh Diskominfostandi Kota Bekasi, diantaranya dapat dilihat pada Tabel II.14, sebagai berikut :

**Tabel II.14**  
**Dukungan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)**  
**di Wilayah Kota Bekasi**

No.	Puskesmas
1	Puskesmas Kaliabang Tengah
2	Puskesmas Marga Mulya
3	Puskesmas Teluk Pucung
4	Puskesmas Seroja
5	Puskesmas Harapan Baru
6	Puskesmas Jati Karya
7	Puskesmas Medan Satria
8	Puskesmas Harapan Mulya
9	Puskesmas Kalibaru
10	Puskesmas Pejuang
11	Puskesmas Kranji
12	Puskesmas Bintara Jaya
13	Puskesmas Bintara
14	Puskesmas Rawa Tembaga
15	Puskesmas Kota Baru
16	Puskesmas Jaka Setia
17	Puskesmas Marga Jaya
18	Puskesmas Pekayon Jaya
19	Puskesmas Jaka Mulya
20	Puskesmas Perumnas II
21	Puskesmas Bantar Gebang
22	Puskesmas Ciketing Udik
23	Puskesmas Cimuning
24	Puskesmas Sumur Batu
25	Puskesmas Mustika Sari
26	Puskesmas Bojong Menteng
27	Puskesmas Pengasinan
28	Puskesmas Bojong Rawa Lumbu
29	Puskesmas Aren Jaya
30	Puskesmas Karang Kitri
31	Puskesmas Bekasi Jaya
32	Puskesmas Duren Jaya
33	Puskesmas Mustika Jaya
34	Puskesmas Jati Warna
35	Puskesmas Jatirahayu
36	Puskesmas Jatiranggon
37	Puskesmas Jati Sampurna
38	Puskesmas Jatimekar
39	Puskesmas Jati Kramat
40	Puskesmas Jatiluhur
41	Puskesmas Jatiasih
42	Puskesmas Jatibening Baru
43	Puskesmas Jatimakmur
44	Puskesmas Jatibening
45	Puskesmas Pondok Gede
46	Puskesmas Sepanjang Jaya
47	Puskesmas Cikiwul
48	Puskesmas Perwira
49	Puskesmas Padurenan
50	Puskesmas Jatimelati
51	Puskesmas Jatimurni

Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

Dukungan 315 (*tiga ratus lima belas*) Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Wilayah Kota Bekasi serta 56 (*lima puluh enam*)

Sekolah Menengah Pertama (*SMPN*) dan 4 (empat) Unit Sekolah Baru *SMPN* di Wilayah Kota Bekasi sebagai Unsur Pemerintahan Kota Bekasi dalam memfasilitasi Jaringan Intra Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja oleh Diskominfostandi Kota Bekasi.

#### **2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi**

Tantangan pengembangan pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi meliputi kendala infrastruktur dan literasi digital masyarakat. Sedangkan untuk peluangnya terletak pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik, penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral, penyelenggaraan keamanan informasi dan siber, sumber daya keamanan informasi dan persandian, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Diskominfostandi Kota Bekasi

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi

Pada RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 terkait Permasalahan Pembangunan Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar II.2 Permasalahn Pembangunan Kota Bekasi**  
Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Pada gambar diatas, Permasalahan Pembangunan Kota Bekasi pada Aspek Daya Saing Daerah mengenai Transformasi Digital, antara lain :

- Belum optimalnya literasi digital masyarakat meskipun adopsi TIK sudah tinggi;
- Perlunya mitigasi risiko terhadap keamanan data dan privasi sehingga perlu langkah adaptif dalam menghadapi potensi kebocoran data dan pelanggaran privasi dalam implementasi transformasi digital.

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, pada Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 di Aspek Daya Saing Daerah, Diskominfostandi Kota Bekasi mendukung IKD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu Adopsi TIK

sebagai Perangkat Daerah pengampu di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika.

Diskominfostandi Kota Bekasi memiliki Tugas yaitu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Dalam rangka menjalankan Tugas tersebut maka Diskominfostandi Kota Bekasi memiliki Fungsi sebagai berikut :

- Penetapan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Lingkup Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- Pemberian Pelayanan dan Pembinaan kepada Unsur terkait di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, serta Pelaksanaan Hubungan Kerjasama dengan Perangkat Daerah, Lembaga atau Instansi terkait dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Dinas.

Sedangkan Permasalahan Pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

**Tabel II.15**  
**Identifikasi Masalah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sinkronisasi Pengembangan dan Pemanfaatan <i>e-Government</i> untuk Perluasan Aksesibilitas Informasi dan Layanan Publik	Belum Optimalnya Pemanfaatan <i>e-Government</i> dalam mendapatkan Informasi dan Layanan Publik	Rendahnya Pengetahuan tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Masyarakat Kota Bekasi
		Belum Optimalnya Penguatan Literasi Aparatur dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kurangnya Literasi Aparatur dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

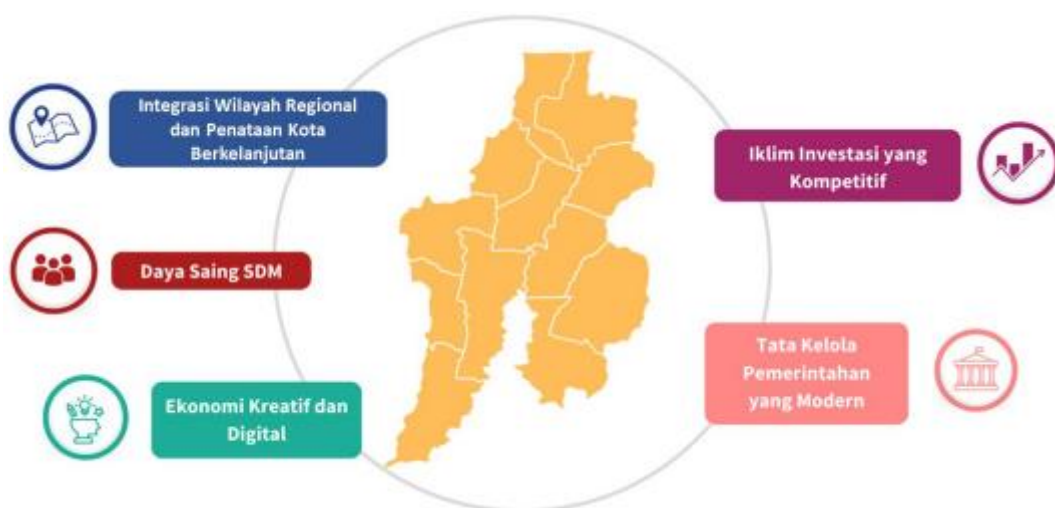
No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Diseminasi dan Distribusi Informasi	Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi Publik	Belum Optimalnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi, berupa <b>infrastruktur fisik maupun logis</b> , seperti perangkat keras (perangkat komputer, modem, serat optik), perangkat lunak, dan jaringan, yang digunakan untuk <b>mengirim, menerima, dan mengelola aliran data atau informasi</b> dalam suatu sistem komunikasi
			Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Sumber Daya Komunikasi
			Belum Optimalnya Pemanfaatan Layanan Pengaduan Masyarakat
3	Penyelenggaraan Pemerintahan melalui Pemanfaatan Teknologi Informatika dan Komunikasi	Belum Optimalnya Dukungan Infrastruktur Jaringan TIK di Kota Bekasi	Terbatasnya Ketersediaan Jaringan Fiber Optik untuk mendukung Kelancaran Akses Data dan Informasi di Kota Bekasi ( <i>Existing</i> Infrastuktur FO terbangun ±22,6 km), ideal tersedianya jaringan fiber optik yaitu pada seluruh Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Pemerintah Kota Bekasi
		Belum Optimalnya Penyediaan dan Kualitas Jaringan Telekomunikasi dan Informatika	Terbatasnya Ketersediaan Akses Jaringan Internet Berkecepatan Tinggi, persebaran tersedianya jaringan intra pemerintah daerah (akses jaringan internet yang keamanannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku) seluruh Perangkat Daerah dan unit kerja dengan kapasitas 100 mbps untuk Perangkat Daerah dan 50 mpbs untuk Unit Kerja dan dapat ditingkatkan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi penggunaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum Optimalnya Pemanfaatan <i>Hosting</i> dan <i>Colocation</i> pada Infrastruktur Pusat Data Pemerintah Kota Bekasi yang telah Tersertifikasi ISO 27001:2022	Belum Optimalnya Pengintegrasian Aset Data dan Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Digital Perangkat Daerah
4	Keamanan Sistem Elektronik atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( <i>SPBE</i> ) dalam mendukung Pembentukan Ekosistem Kota Pintar ( <i>Smart City</i> )	Belum Optimalnya Penanganan Keamanan Informasi Sistem Elektronik atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( <i>SPBE</i> )	Belum Optimal Perangkat Daerah dalam Penerapan Layanan Keamanan Informasi
5	Keterbatasan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Belum Optimalnya Ketersediaan Data di Perangkat Daerah	Data belum Akurat, Mutakhir, Terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan
		Belum Optimalnya Proses Pengumpulan data	Inkonsistensi Data ( <i>Jangka Waktu dalam Proses Pengambilan Data</i> )

Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

### 2.2.2 Isu Strategis Diskominfostandi Kota Bekasi

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, isu sesuai konteks dan dengan memperhatikan potensi daerah, maka rumusan isu strategis Kota Bekasi untuk 5 tahun ke depan adalah seperti pada gambar di bawah ini :



**Gambar II.3 Isu Strategis Kota Bekasi**

Sumber : Analisis Bappelitbangda Kota Bekasi. 2025

- **Integrasi Wilayah Regional dan Penataan Kota Berkelanjutan**

Peran Jakarta sebagai kota global membawa pengaruh besar terhadap Kota Bekasi. Aksesibilitas yang memadai dengan Jakarta menjadikan Kota Bekasi menarik bagi para komuter dan pendatang serta menjadi tempat yang menarik untuk tinggal, bekerja dan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Bekasi akan semakin padat. Kota Bekasi merupakan bagian pengembangan wilayah Jabodetabekpunjur, sehingga pengembangan wilayah perlu terintegrasi dari sisi transportasi maupun penggunaan lahan. Kolaborasi dan kemitraan antar pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong integrasi pembangunan mengingat berbagai rencana pembangunan infrastruktur berskala Nasional yang berlokasi atau melintasi Kota Bekasi.

Perkembangan pembangunan di Kota Bekasi yang pesat berimplikasi pada kebutuhan lahan yang makin meningkat. Dengan ketersediaannya lahan yang semakin terbatas maka pengendalian ruang agar pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang harus dioptimalkan. Tidak hanya itu, sebagai kota metropolitan, Kota Bekasi telah transformasi menjadi mega urban sehingga mendorong pengelolaan kota harus menggunakan pendekatan *smart city*. Berbagai infrastruktur pendukung sangat diperlukan dan tentunya harus ramah lingkungan, mengingat Kota Bekasi sangat rentan dengan berbagai ancaman bencana seperti banjir dan cuaca ekstrem. Upaya-upaya pelestarian lingkungan perlu dilakukan untuk menjaga *trade-off* jasa ekosistem, karena pada dasarnya kota juga membutuhkan jasa dari ekosistem penyedia, pengatur, sosial maupun biodiversitas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- **Daya Saing SDM**

Bonus demografi yang dimiliki Kota Bekasi saat ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Keberadaan SDM usia produktif

yang melimpah menjadi peluang strategis bagi kota ini dalam mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Namun, jumlah SDM yang besar harus disertai dengan peningkatan kualitas, terutama dalam hal literasi yang masih menjadi tantangan utama. Sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Bekasi membutuhkan SDM yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki daya saing tinggi. Jika literasi rendah, maka pemahaman, keterampilan berpikir kritis, serta kualitas hidup masyarakat di masa depan bisa terpengaruh.

Peningkatan kualitas SDM Kota Bekasi juga harus didukung dengan pendidikan karakter dan budaya. Pendidikan ini berperan dalam membentuk moral, etika, serta identitas budaya yang kuat, sehingga menghasilkan masyarakat yang berintegritas dan memiliki kesadaran sosial tinggi untuk kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya kota. Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi harus dapat memastikan bahwa akses terhadap kesehatan dan lapangan kerja juga perlu ditingkatkan. Kondisi ini diharapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengingat ketimpangan pendapatan dan pengangguran terbuka Kota Bekasi masih tinggi.

- **Ekonomi Kreatif dan Digital**

Kota Bekasi tidak memiliki kekayaan alam melimpah, sehingga kota ini cukup banyak mengandalkan perkembangan kesejahteraan wilayahnya dari sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi, pergudangan, dan konstruksi sebagai mesin penggerak ekonominya. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan era ekonomi digital merupakan sebuah peluang yang harus dioptimalkan. Dengan bertambahnya penduduk usia produktif, Kota Bekasi tentu juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif yang juga mengandalkan inovasi dan kreativitas SDM, khususnya bagi generasi muda. Oleh karena itu, ekonomi kreatif perlu

mendapatkan perhatian lebih sebagai sektor baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kota ke depannya.

Bekasi Creative Hub (BCH), yang telah ada, perlu dioptimalkan dengan melibatkan lebih banyak pelaku industri kreatif agar manfaatnya semakin luas. Dukungan terhadap infrastruktur transportasi dan aksesibilitas menjadi faktor penting untuk menunjang distribusi produk kreatif dan meningkatkan daya saing pelaku industri di Kota Bekasi. Selain itu, peningkatan keterampilan bagi masyarakat menjadi hal yang krusial. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan pelaku industri kreatif sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital dan kreatif yang berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, Kota Bekasi dapat menjadikan ekonomi digital dan kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan.

- **Iklim Investasi yang Kompetitif**

Jumlah penduduk Kota Bekasi yang cukup besar merupakan sebuah potensi bagi peningkatan daya tarik investasi, terutama pada sektor jasa dan perdagangan. Dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, kebutuhan terhadap sektor-sektor seperti pusat perbelanjaan, kuliner, properti, serta layanan kesehatan dan pendidikan akan semakin meningkat. Selain itu, keberadaan infrastruktur yang terus berkembang, seperti jalan tol dan transportasi umum, dapat berpotensi memperkuat daya tarik Bekasi sebagai lokasi strategis bagi investor. Jika didukung dengan perizinan yang mudah dan kebijakan pro-investasi, Kota Bekasi berpotensi menjadi pusat ekonomi regional yang kompetitif dan berdaya saing tinggi.

Kondisi investasi yang berkembang dengan baik perlu untuk dioptimalkan ke depannya. Persaingan investasi antara Kota Bekasi dengan daerah lain perlu untuk menjadi fokus perhatian agar investor dapat nyaman melakukan investasi di wilayah ini. Selain itu, perlu untuk dapat

menguatkan kebijakan agar investor yang melakukan kerja sama di Kota Bekasi bersedia untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal agar kondisi ekonomi masyarakat dapat meningkat.

- **Tata Kelola Pemerintahan yang Modern**

Penduduk Kota Bekasi cenderung meningkat dengan karakter heterogen serta berciri urban yang kuat. Perkembangan kota dan penduduknya yang makin kompleks mengharuskan pengelolaan kota yang prima. Pelayanan publik tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat saja namun juga dituntut menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan jangkauan yang lebih merata. Inovasi dan teknologi harus menjadi perangkat utama dalam melaksanakan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pesatnya pembangunan yang terjadi baik dari arus perkembangan dalam wilayah maupun dari luar wilayah, mengharuskan kondisi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif.

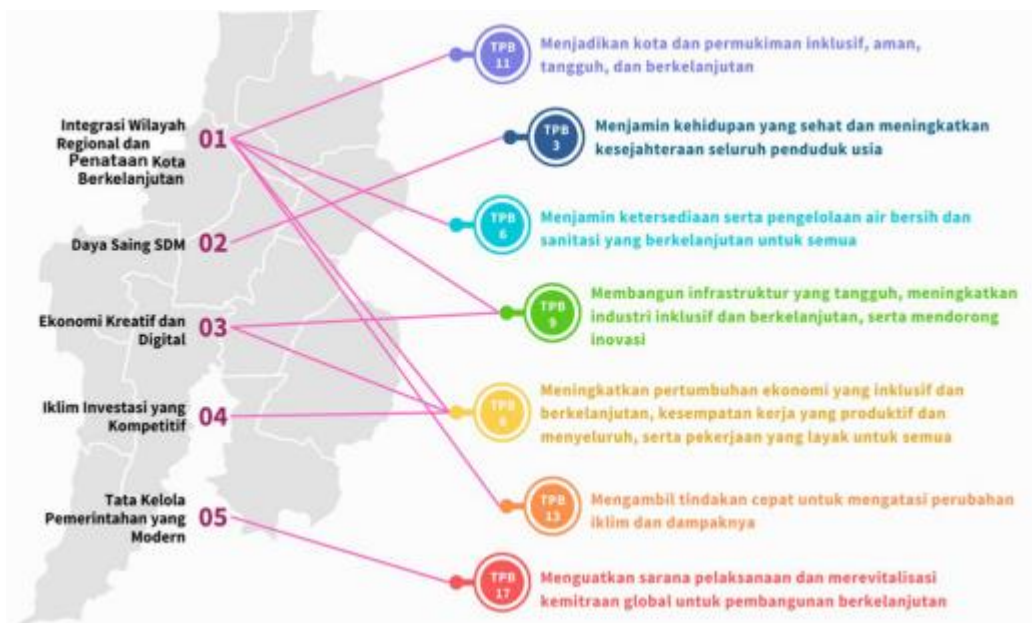
Perumusan isu strategis Kota Bekasi seperti yang diuraikan di atas juga telah mempertimbangkan rekomendasi isu dari KLHS RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Rekomendasi isu berdasarkan KLHS, antara lain :

- Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (TPB 11);
- Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk usia (TPB 3);
- Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (TPB 6);
- Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (TPB 9);
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (TPB

8);

- Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (TPB 13); dan
- Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (TPB 17).

Dari rekomendasi yang dihasilkan terdapat korelasi dengan isu strategis Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah dirumuskan. Korelasi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



**Gambar II.4 Keterkaitan Isu Strategis Kota Bekasi dengan Rekomendasi KLHS RPJMD Tahun 2025-2029**  
Sumber : Analisis Bappelitbangda Kota Bekasi. 2025

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Isu Strategis Kota Bekasi (Potensi Daerah) yang menjadi kewenangan Diskominfostandi Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

**Tabel II.16**  
**Isu Strategis Diskominfostandi Kota Bekasi**

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ekonomi Kreatif dan Digital	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi Pengembangan dan Pemanfaatan <i>e-Government</i> untuk Perluasan Aksesibilitas Informasi dan Layanan Publik</li> <li>2. Diseminasi dan Distribusi Informasi</li> <li>3. Penyelenggaraan Pemerintahan melalui Pemanfaatan Teknologi Informatika dan Komunikasi</li> </ol>	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (TPB 9)	Kondisi Perubahan Demografi Global	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Penguatan Layanan Infrastruktur Dasar	Pemanfaatan Teknologi Informatika dan Komunikasi dalam mendukung perwujudan Dimensi Smart City
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Keamanan Sistem Elektronik atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>SPBE</i>) dalam mendukung Pembentukan Ekosistem Kota Pintar (<i>Smart City</i>)</li> <li>5. Keterbatasan Data dan Informasi Perangkat Daerah</li> <li>6. Belum optimalnya literasi digital masyarakat meskipun adopsi TIK sudah tinggi</li> </ol>					

Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Isu Strategis Kota Bekasi (Potensi Daerah) yang menjadi kewenangan Diskominfostandi Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi Kreatif dan Digital

Dalam menghadapi transformasi digital, peningkatan keterampilan digital bagi masyarakat menjadi hal yang krusial. Akses terhadap layanan digital juga perlu diperluas, tidak hanya untuk sektor pemerintahan tetapi juga bagi

seluruh lapisan masyarakat agar inklusif dan merata. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan pelaku industri kreatif sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital dan kreatif yang berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, Kota Bekasi dapat menjadikan ekonomi digital dan kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 adalah **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**



**Gambar III.1 Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029**  
*Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029*

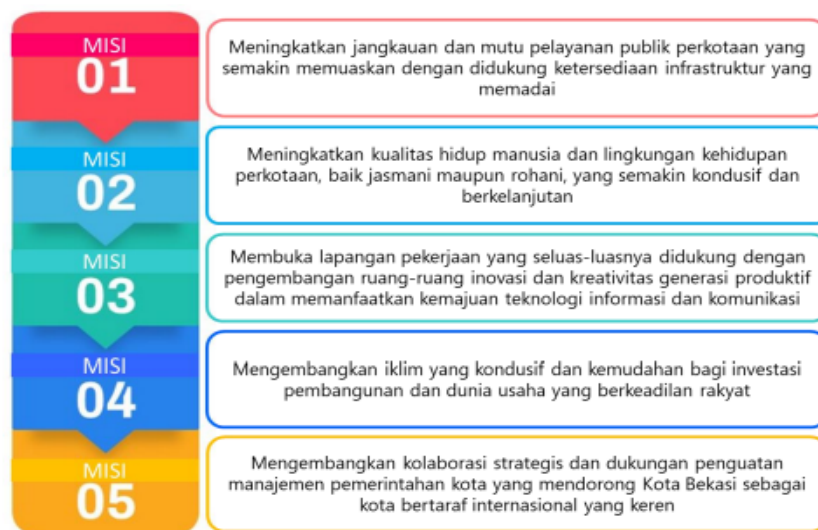
Visi ini memiliki kandungan makna bahwa “Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera”. Kata “yang Semakin” menunjukkan semangat pembaruan untuk menjadikan kondisi Kota Bekasi yang lebih maju dari kondisi sebelumnya. Apa yang sudah baik, dilanjutkan. Apa yang tidak baik, dihilangkan. Apa yang masih kurang, diperbaiki. Apa yang masih belum tertangani, dilengkapi. Apa yang belum sempurna, disempurnakan.

Kata “Nyaman” menunjukkan gambaran keadaan yang kondusif kehidupan perkotaannya, aman terlindungi bagi warganya, asri suasana lingkungan kotanya, tenang beraktivitas kesehariannya, terjamin bebas dalam berekspresi, dan guyub rukun saling menghargai dalam kehidupan beragama dan kebudayanya di Kota Bekasi.

Kata “Sejahtera” menunjukkan gambaran kondisi dan

taraf kehidupan warga kotanya yang baik, dalam arti cukup “sandang, pangan, dan papan” serta sehat, cerdas, dan berpendapatan yang layak untuk menghidupi diri dan keluarganya.

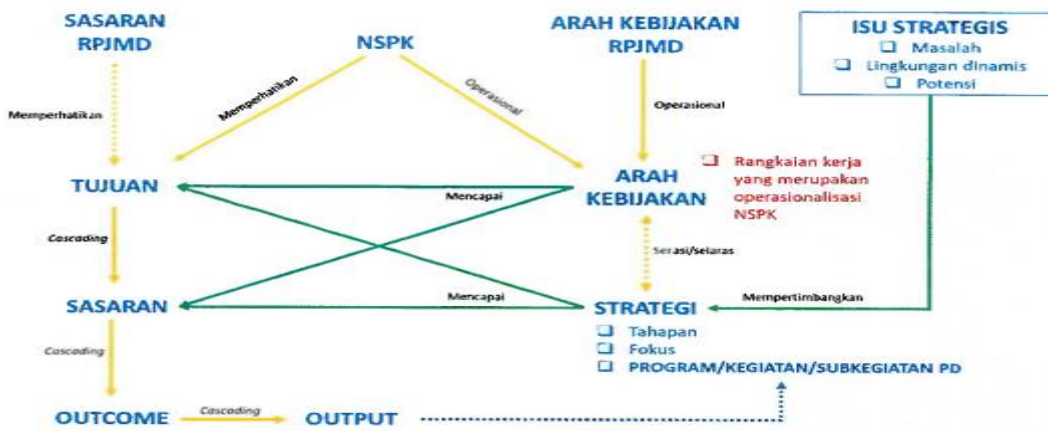
Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut, seperti pada gambar di bawah ini.



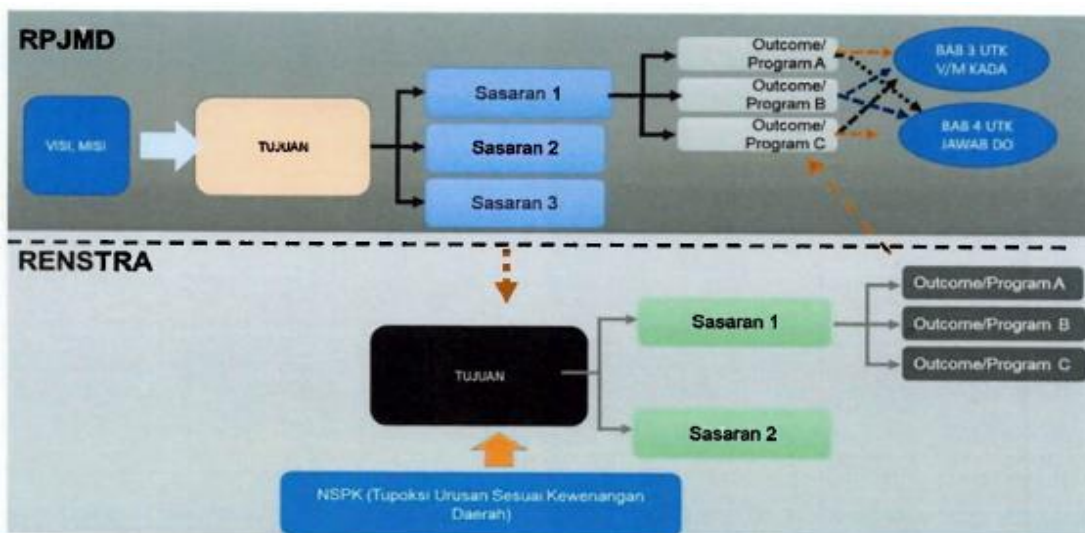
**Gambar III.2 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029**  
 Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran adalah Tahap Perumusan Sasaran Strategis yang menunjukkan Tingkat Prioritas Tertinggi dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar Penyusunan Kerangka Kinerja Perangkat Daerah selama 5 (*lima*) Tahun.

Tujuan adalah Pernyataan tentang hal-hal yang diperlukan untuk memecahkan Permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Sedangkan Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan yang diformulasikan secara Terukur, Spesifik, Mudah Dicapai, Rasional, untuk dapat dilaksanakan selama kurun waktu 5 (*lima*) Tahun ke depan.



**Gambar III.3 Konsep RENSTRA Perangkat Daerah**  
 Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025



**Gambar III.4 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan RENSTRA Perangkat Daerah**  
 Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Diskominfostandi Kota Bekasi mendukung pencapaian dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Dalam rangka menjalankan Misi Kota Bekasi yang ke-5 (Misi-5) yaitu “Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren”, dan Misi-5 ini dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan multi-pihak

dan sekaligus menyiapkan terpenuhinya prasyarat kehidupan perkotaan yang bertaraf internasional dari berbagai aspek, khususnya dalam pencapaian *Sustainable Development Goal (SDG)* yang ditetapkan PBB. Misi kelima ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel, sehingga mampu membentuk kota yang bertaraf internasional.



**Gambar III.5 Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029**  
 Sumber : Bappelitbangda Kota Bekasi. 2025

Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang relevan atau yang terkait dengan Urusan Diskominfostandi Kota Bekasi yaitu **"Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas"**, yang berarti bahwa transformasi Kota Bekasi diharapkan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal melalui sistem digital yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, efisiensi layanan, dan partisipasi warga yang aktif.

**Tabel III.1**  
**Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029**

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
<p><b>Visi :</b> "Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera"</p> <p><b>Misi :</b> 5. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren.</p>	Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai Tata Kelola Pemerintahan Modern dan Inovatif	Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas	Indeks Kota Cerdas	Indeks (Nilai)	3,60	3,66	3,72	3,78	3,84	3,90	3,93

Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Maka Diskominfostandi Kota Bekasi merumuskan 1 (satu) Tujuan sebagai berikut :

Tujuan : *Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi untuk Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas*

Indikator Tujuan : *Indeks Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi*

Diskominfostandi Kota Bekasi merumuskan Tujuan yaitu "Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi untuk Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas " dengan Indikator Tujuan yaitu "Indeks Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi".

### 3.2 Sasaran RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Dalam rangka mencapai Tujuan diatas, dirumuskan Sasaran yaitu Rumusan Kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa Hasil Kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Hasil (*Outcome*) Program Perangkat Daerah.

Sasaran juga merupakan Penjabaran dari Tujuan yang diperoleh secara Terukur dan Nyata akan dicapai dalam setiap Tahun. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung Tujuan adalah :

- Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Komunikasi Informasi dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
- Indikator Sasaran 1 : Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik
- Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral
- Indikator Sasaran 2 : Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral
- Sasaran 3 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
- Indikator Sasaran 3 : Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Target Tujuan dan Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 tergambar pada Tabel, sebagai berikut :

**Tabel III.2**  
**Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran**  
**Diskominfostandi Kota Bekasi**  
**Tahun 2025-2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
<b>NSPK :</b> Diskominfostandi Kota Bekasi akan Pelayanannya, antara lain :  Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika);  Urusan Pemerintahan Bidang Statistik (Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah); dan  Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Peraturan Badan Siber	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi untuk Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas	-	Indeks Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	4,61	4,94	4,95	4,95	4,95	4,95	Tujuan dan Indikator Baru	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Komunikasi dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik	4,45	4,84	4,85	4,85	4,86	4,86	Sasaran dan Indikator Baru	
		Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral	4,38	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Sasaran dan Indikator Baru
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Sasaran dan Indikator Baru

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator (4)	Target Tahun						Ket. (11)
				2025 (5)	2026 (6)	2027 (7)	2028 (8)	2029 (9)	2030 (10)	
<p>dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah).</p> <p><b>Sasaran RPJMD Kota Bekasi :</b> Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas</p>										

Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

Adapun Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**Tabel III.3**  
**Formulasi Perhitungan IKU Diskominfostandi Kota Bekasi**

No.	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Komunikasi Informasi dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi</b>	Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks	<p>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 - 2019;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</p>	<p><b>Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik</b> {Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik + Nilai Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital} : 2</p> <p><b>Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik</b> Nilai Rataan Survey IKM (PermenPAN RB) yang dilakukan Persemester dalam 1 Tahun Anggaran x (5 Indeks) <b>Hasil Survey</b> Rumus Perhitungan : - U1 s.d U9 = Unsur Pelayanan - NNR = Nilai Rata-rata - IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat -*) = Jumlah NRR IKM Tertimbang -**) = Jumlah NNR Tertimbang x 25 - NRR Per Unsur = <math>\frac{\text{Jumlah nilai perunsur}}{\text{Jumlah kuesioner yang terisi}}</math> - NRR = NRR per unsur x 0,011</p> <p><b>Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital</b> Nilai Rataan{( Cakupan Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah + Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Pusat Data) + Persentase Jumlah Platform dengan Database yang Terintegrasi + Persentase Jumlah Layanan Digital PD)} x 5 (Indeks)</p>	Kepala Dinas Diskominfostandi Kota Bekasi	Diskominfostandi Kota Bekasi

No.	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data
2	<b>Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral</b>	Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Indeks	<p>Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;</p> <p>Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan E-Government;</p> <p>Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;</p>	<p>{Nilai Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital }</p> <p><b>Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital :</b>  <math>\frac{\text{Jumlah Data Sektoral pada PD Berbasis Digital}}{\text{Jumlah Data Sektoral pada PD}} \times 5</math> (Indeks)</p>	Kepala Dinas Diskomifostandi Kota Bekasi	Diskominfostandi Kota Bekasi
3	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>	Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks	<p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;</p> <p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;</p> <p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan</p>	<p><b>Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi</b></p> <p>{(Persentase persentase penyediaan layanan keamanan informasi x 0,4)+ Persentase pelaksanaan keamanan informasi x 0,3) + Persentase penyelenggaraan jaring komunikasi standi dan pemenuhan alat pendukung dan utama persandian x 0,3):100}5 indeks</p> <p>= <b>Persentase persentase penyediaan layanan keamanan informasi</b> (Jumlah pengukuran tingkat kematangan informasi + Jumlah Audit Reviuw Standarisasi ISO + Jumlah sertifikasi ISO + Jumlah Infrastruktur Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan fasilitas teknologi keamanan informasi +Jumlah insiden Keamanan Informasi yang dapat ditanggulangi dan dipulihkan ) + <b>Persentase pelaksanaan keamanan informasi</b> (Jumlah pengamanan sinyal + Jumlah aparatur yang menerbitkan sertifikasi elektronik + Jumlah aplikasi yang akan menggunakan sertifikasi elektronik(tanda tangan elektronik) ) + <b>Persentase penyelenggaraan jaring komunikasi standi dan pemenuhan alat pendukung dan utama persandian = 100%</b></p>	Kepala Dinas Diskomifostandi Kota Bekasi	Diskominfostandi Kota Bekasi

No.	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data
				<p>Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</p> <p>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1).</p> <p>Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 120/066/Bangda tanggal 07 Januari 2019 Perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik;</p> <p>Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;</p> <p>Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;</p>			

No.	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data
				<p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;</p> <p>Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555/Kep.150-Diskominfostandi/III/2017 tentang Tata Kelola Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;</p> <p>Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555.3/Kep.83-Diskominfostandi/I/2018 tentang Petunjuk Teknis</p>			

No.	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kota Bekasi.			

Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

### 3.3 Strategi Diskominfostandi Kota Bekasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan dengan optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RENSTRA. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Penahapan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

**Tabel III.4**  
**Penahapan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi**

<b>Uraian Kegiatan Utama</b>	<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Penyelenggaraan Pemerintahan melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	Tahap persiapan dan penataan dasar sistem pemerintahan berbasis TIK.	Penguatan tata kelola dan koordinasi antar unit kerja.	Penerapan sistem digital secara lebih luas dan terpadu.	Pemantapan sistem untuk peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan.	Terwujudnya pemerintahan berbasis data dan teknologi yang matang dan berkelanjutan.
Sinkronisasi Pengembangan dan Pemanfaatan e-Government untuk Aksesibilitas Informasi dan Layanan Publik.	Penyusunan arah kebijakan dan pedoman integrasi layanan digital.	Penguatan konektivitas dan konsistensi antar sistem layanan publik.	Implementasi terpadu berbagai platform e-Government.	Optimalisasi pelayanan publik digital lintas sektor.	Sistem e-Government terintegrasi penuh, inklusif, dan berorientasi warga.
Diseminasi dan Distribusi Informasi Publik.	Penguatan saluran komunikasi dan sosialisasi digital pemerintah.	Peningkatan kualitas informasi publik dan penyebarannya.	Pengembangan komunikasi publik yang partisipatif.	Penguatan strategi komunikasi berbasis data dan transparansi.	Kota dengan ekosistem informasi publik yang terbuka, interaktif, dan terpercaya.
Peningkatan Kemampuan SDM dalam Pemanfaatan TIK untuk Pelayanan Publik	Peningkatan dasar literasi digital ASN dan aparatur daerah.	Penguatan kapasitas dan pembinaan kompetensi TIK.	Pembentukan budaya kerja digital di seluruh perangkat daerah.	Pengembangan kreativitas dan inovasi ASN digital.	SDM pemerintah daerah unggul dan mandiri dalam mengelola layanan digital.

<b>Uraian Kegiatan Utama</b>	<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Keterbukaan dan Ketersediaan Informasi serta Data Kota Bekasi	Penguatan kebijakan dan kelembagaan pengelola data.	Konsolidasi dan verifikasi data sektoral.	Pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan.	Pemantapan sistem berbagi data antar sektor dan masyarakat.	Terwujudnya tata kelola data terbuka dan ekosistem informasi publik yang transparan.
Keamanan Informasi e-Government / SPBE untuk Mendukung Ekosistem Smart City	Penguatan tata Kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif.	Penerapan pengembangan layanan keamanan informasi dan peningkatan sumber daya keamanan informasi.	Penguatan prosedur keamanan dan audit manajemen keamanan SPBE	Penerapan manajemen risiko keamanan SPBE	Keamanan informasi menjadi budaya organisasi dan mendukung penyelenggaraan SPBE serta ekosistem Smart City yang tangguh.

Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

### **3.4 Arah Kebijakan Diskominfostandi Kota Bekasi dalam mencapai RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029**

Arah Kebijakan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Diskominfostandi Kota Bekasi dan arah kebijakan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Arah Kebijakan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi sebagai berikut :

**Tabel III.5**  
**Arah Kebijakan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi**

<b>No.</b>	<b>Operasionalisasi NSPK</b>	<b>Arah Kebijakan RPJMD</b>	<b>Araha Kebijakan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi</b>	<b>Ket.</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di semua lini pelayanan publik;</li> <li>• Peningkatan kualitas dan jangkauan penerapan smart city;</li> <li>• Penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif berbasis TIK.</li> </ul>	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informatika dan Komunikasi dalam mendukung Perwujudan Dimensi Smart City	

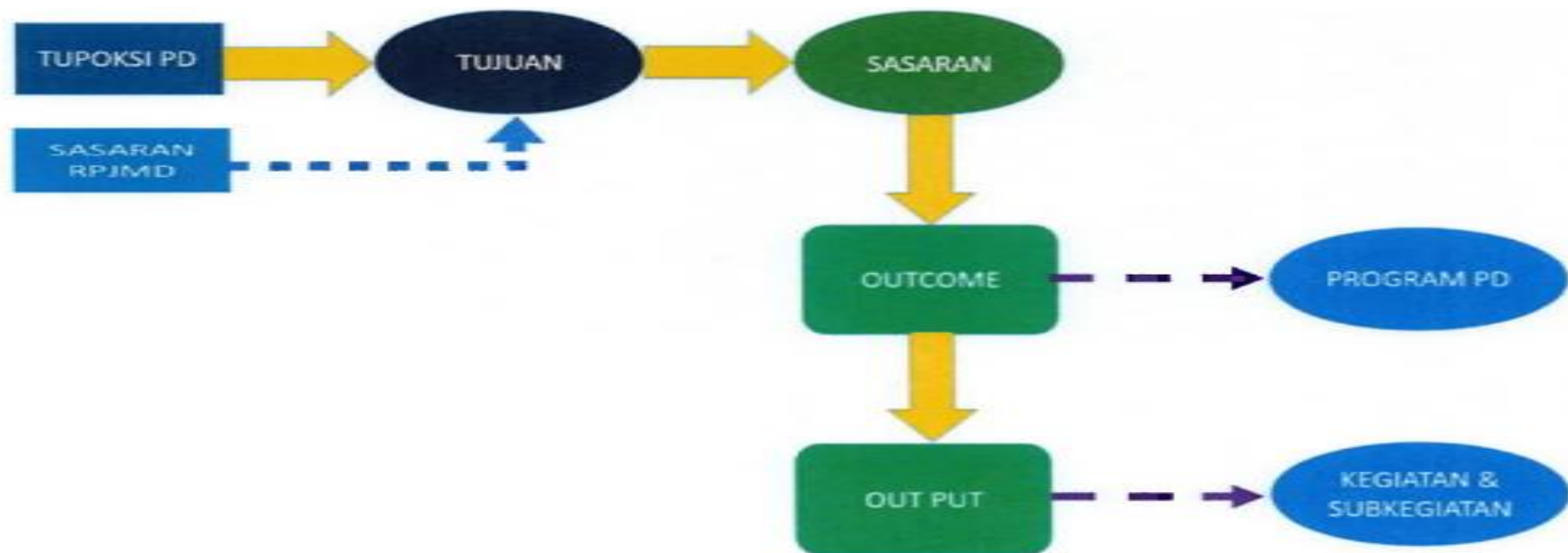
*Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi*

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Diskominfostandi Kota Bekasi

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output sebagai berikut :



**Gambar IV.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan RENSTRA Perangkat Daerah**

*Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025*

Dalam proses penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2025 telah terjadi Pemutakhiran pada Sub Kegiatan di dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) dapat dilihat pada tabel IV.1 :

**Tabel IV.1**  
**Pemutakhiran pada Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**  
**Diskominfostandi Kota Bekasi**

PEMUTAHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA APLIKASI SIPD-RI									
PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN NOMENKLATUR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN INDIKATOR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SATUAN TARGET	PERUBAHAN SATUAN TARGET SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN SATUAN TARGET YANG KE-2 SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	I. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	I. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	IP: Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik	IP: Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik	IP: Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik	Indeks	Indeks	Indeks
1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	%	%
1. Relasi Media	1. Relasi Media	1. Relasi Media	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang Memenuhi Kriteria sebagai berikut : 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam Kegiatan Relasi Media.	Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang Memenuhi Kriteria sebagai berikut : 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam Kegiatan Relasi Media.	Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang Memenuhi Kriteria sebagai berikut : 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam Kegiatan Relasi Media.	Laporan	Laporan	Laporan

PEMUTHAHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA APLIKASI SIPD-RI									
PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN NOMENKLATUR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN INDIKATOR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SATUAN TARGET	PERUBAHAN SATUAN TARGET SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN SATUAN TARGET YANG KE-2 SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. Pelayanan Informasi Publik	2. Pelayanan Informasi Publik	2. Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Layanan Pengaduan Pemerintah Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pemohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai Peraturan Perundangan	Jumlah Pemohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai Peraturan Perundangan	Dokumen	Permohonan	Permohonan
3. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	3. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	3. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Termonitornya Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Rekomendasi Komunikasi terhadap Isu Publik yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	Jumlah Rekomendasi Komunikasi terhadap Isu Publik yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	Dokumen	Rekomendasi	Rekomendasi
4. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4. Diseminasi Informasi	4. Diseminasi Informasi	Terlaksananya Diseminasi Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Khalayak yang Terpapar Informasi Publik	Persentase Khalayak yang Terpapar Informasi Publik	Dokumen	%	%

PEMUTHAHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA APLIKASI SIPD-RI									
PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN NOMENKLATUR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN INDIKATOR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SATUAN TARGET	PERUBAHAN SATUAN TARGET SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN SATUAN TARGET YANG KE-2 SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terkelolanya Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola maupun Pemanfaatan Media Berbayar sesuai Kriteria/Juknis	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola maupun Pemanfaatan Media Berbayar sesuai Kriteria/Juknis	Dokumen	Media	Media
-	-	6. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Tersedianya Strategi Komunikasi Publik	-	-	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	-	-	Dokumen
6. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	6. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	7. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang Difasilitasi Mengikuti Bimtek/Pelatihan	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang Difasilitasi Mengikuti Bimtek/Pelatihan	Orang	Orang	Orang

PEMUTHAHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA APLIKASI SIPD-RI									
PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN NOMENKLATUR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN INDIKATOR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SATUAN TARGET	PERUBAHAN SATUAN TARGET SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN SATUAN TARGET YANG KE-2 SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
II. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	II. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	II. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	IP: Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	IP: Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	IP: Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks	Indeks	Indeks
2. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK, Pusat Data dan Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	Persentase Pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK, Pusat Data dan Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	Persentase Pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK, Pusat Data dan Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	%	%	%
7. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7. Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	8. Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	Laporan	Dokumen
8. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	8. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	9. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terselenggaranya Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dokumen	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
9. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	9. Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	10. Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Dokumen Keterhubungan Pusat Kendali dengan Pusat Data Nasional	Jumlah Laporan Operasionalisasi Pusat Kendali	Unit	Dokumen	Laporan

PEMUTHAHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA APLIKASI SIPD-RI									
PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN NOMENKLATUR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN INDIKATOR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SATUAN TARGET	PERUBAHAN SATUAN TARGET SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN SATUAN TARGET YANG KE-2 SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	10. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	11. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam Rangka Interopabilitas Data dan Integrasi Layanan	Terselenggaranya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam Rangka Interopabilitas Data dan Integrasi Layanan	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	Aplikasi	Aplikasi
11. Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	11. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	12. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Terselenggaranya Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	Dokumen	Laporan
12. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	12. Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis	13. Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola SPBE meliputi Arsitektur, Peta Rencana, Proses Bisnis, serta Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola SPBE meliputi Arsitektur, Peta Rencana, Proses Bisnis, serta Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Dokumen Proses Bisnis di Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Kebijakan Tata Kelola SPBE meliputi Arsitektur, Peta Rencana, Proses Bisnis, serta Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Unit	Dokumen	Dokumen
13. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	13. Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	14. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan <i>Masterplan Smart City</i>	Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	Program	Dokumen

PEMUTHAHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA APLIKASI SIPD-RI									
PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN NOMENKLATUR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN INDIKATOR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SATUAN TARGET	PERUBAHAN SATUAN TARGET SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN SATUAN TARGET YANG KE-2 SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
III. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	III. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	III. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	IP: Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital	IP: Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital	IP: Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital	Indeks	Indeks	Indeks
3. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	3. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	3. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Bekasi	Persentase Ketersediaan Data Sektoral pada Perangkat Daerah Berbasis Digital	Persentase Ketersediaan Data Sektoral pada Perangkat Daerah Berbasis Digital	Persentase Ketersediaan Data Sektoral pada Perangkat Daerah Berbasis Digital	%	%	%
-	14. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	15. Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	-	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah Meminta Rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah mendapatkan Rekomendasi dari Pembina Data Statistik	-	Dokumen	%

PEMUTHAHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA APLIKASI SIPD-RI									
PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN NOMENKLATUR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN INDIKATOR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SATUAN TARGET	PERUBAHAN SATUAN TARGET SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN SATUAN TARGET YANG KE-2 SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15. Membangun Metadata Statistik Sektoral	17. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	16. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Terpenuhinya Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi Metadata	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang telah memenuhi Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan Kode Referensi dan/atau Data Induk	Dokumen	Dokumen	%
14. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	15. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	17. Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Rilis Tepat Waktu	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh Pengguna Data	Dokumen	%	%
-	16. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	18. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	-	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Statistik	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Statistik	-	Orang	Orang

PEMUTHAHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA APLIKASI SIPD-RI									
PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN NOMENKLATUR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN INDIKATOR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SATUAN TARGET	PERUBAHAN SATUAN TARGET SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN SATUAN TARGET YANG KE-2 SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
IV. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	IV. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	IV. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	IP : Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	IP : Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	IP : Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	Indeks	Indeks	Indeks
4. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	%	%	%
16. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	18. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	19. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	Laporan	Laporan
17. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah

PEMUTHAHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA APLIKASI SIPD-RI									
PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN NOMENKLATUR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN INDIKATOR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SATUAN TARGET	PERUBAHAN SATUAN TARGET SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN SATUAN TARGET YANG KE-2 SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	5. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	5. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi dan Pemenuhan Alat Pendukung Utama dan Wajib Persandian	Persentase Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi dan Pemenuhan Alat Pendukung Utama dan Wajib Persandian	Persentase Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi dan Pemenuhan Alat Pendukung Utama dan Wajib Persandian	%	%	%
18. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21. Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Pemetaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kegiatan

PEMUTHAHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA APLIKASI SIPD-RI									
PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN NOMENKLATUR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN INDIKATOR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SATUAN TARGET	PERUBAHAN SATUAN TARGET SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN SATUAN TARGET YANG KE-2 SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IP: Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	IP: Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	IP: Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	%	%
6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	%	%	Dokumen
19. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	Dokumen
20. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Laporan	Laporan

PEMUTHAHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA APLIKASI SIPD-RI									
PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN NOMENKLATUR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN INDIKATOR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SATUAN TARGET	PERUBAHAN SATUAN TARGET SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN SATUAN TARGET YANG KE-2 SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				IP: Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	IP: Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	IP: Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	%	%
7. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	%	%	Laporan
21. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	Orang/Bulan
22. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	Laporan

PEMUTHAHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA APLIKASI SIPD-RI									
PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN NOMENKLATUR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN INDIKATOR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SATUAN TARGET	PERUBAHAN SATUAN TARGET SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN SATUAN TARGET YANG KE-2 SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				-	IP: Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	IP: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	-	%	Indeks (Nilai)
-	8. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	-	%	Laporan
-	-	26. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	Paket
-	25. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	27. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Orang	Orang
-	26. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Orang	Orang

PEMUTHAHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA APLIKASI SIPD-RI									
PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN NOMENKLATUR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN INDIKATOR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SATUAN TARGET	PERUBAHAN SATUAN TARGET SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN SATUAN TARGET YANG KE-2 SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				IP: Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	IP: Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	IP: Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	%	%
8. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	%	%	Laporan
23. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	Paket
24. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	Paket
25. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Paket	Paket

PEMUTHAHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA APLIKASI SIPD-RI									
PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN NOMENKLATUR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN INDIKATOR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SATUAN TARGET	PERUBAHAN SATUAN TARGET SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN SATUAN TARGET YANG KE-2 SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
26. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	Dokumen
27. Fasilitasi Kunjungan Tamu	31. Fasilitasi Kunjungan Tamu	33. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	Laporan
28. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	Laporan
29. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terselenggaranya Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Dokumen	Dokumen

PEMUTHAHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA APLIKASI SIPD-RI									
PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN NOMENKLATUR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN INDIKATOR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SATUAN TARGET	PERUBAHAN SATUAN TARGET SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN SATUAN TARGET YANG KE-2 SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				-	IP: Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	IP: Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	-	%	%
-	10. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakanPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	%	Laporan
-	-	36. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	Unit
-	34. Pengadaan Mebel	37. Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Unit	Unit
-	35. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Unit	Unit

PEMUTHAHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA APLIKASI SIPD-RI									
PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN NOMENKLATUR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN INDIKATOR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SATUAN TARGET	PERUBAHAN SATUAN TARGET SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN SATUAN TARGET YANG KE-2 SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				IP : Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	IP : Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	IP : Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	%	%
9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	%	%	Laporan
30. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	Laporan
31. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	Laporan

PEMUTHAHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA APLIKASI SIPD-RI									
PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN NOMENKLATUR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN INDIKATOR YANG KE-2 PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	SATUAN TARGET	PERUBAHAN SATUAN TARGET SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI	PERUBAHAN SATUAN TARGET YANG KE-2 SETELAH PEMUTAKHIRAN PADA APLIKASI SIPD-RI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				IP : Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	IP : Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	IP : Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	%	%
10. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	%	Laporan
32. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	Unit
33. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	Unit
34. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	Unit

Sumber : Aplikasi SIPD-RI

**Tabel IV.2**  
**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Diskominfostandi Kota Bekasi**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p><b>NSPK :</b> <i>Diskominfostandi Kota Bekasi menyelenggarakan Pelayanan, antara lain :</i></p> <p><b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b> <i>(Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika);</i></p> <p><b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b> <i>(Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Nomor 4 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh</i></p>	<p>Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi untuk Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas</p>	-	-	-	Indeks Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-	Diskominfostandi Kota Bekasi
		Meningkatnya Penyelenggaraan Komunikasi Informasi dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-	-	Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik	-	Diskominfostandi Kota Bekasi
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik	-	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik	I. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Bidang IKP	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Bidang IKP		
				Relasi Media	Bidang IKP		
				Pelayanan Informasi Publik	Bidang IKP		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>Pemerintah Daerah); dan</p> <p><b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b> (Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah).</p> <p><b>Sasaran RPJMD Kota Bekasi :</b> Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas</p>						Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Bidang IKP
						Diseminasi Informasi	Bidang IKP
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Bidang IKP
						Penyusunan Strategi Komunikasi Publik  (Sub Kegiatan Usulan)	Bidang IKP
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Bidang IKP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	-	Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	II. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Bidang Egov & Bidang SANTIK
				Pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK, Pusat Data dan Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	Persentase Pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK, Pusat Data dan Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	2. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Egov & Bidang SANTIK
						Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Bidang Egov
						Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Bidang SANTIK
						Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Bidang SANTIK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam Rangka Interopabilitas Data dan Integrasi Layanan	<b>Bidang Egov</b>
						Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	<b>Bidang Egov</b>
						Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola SPBE meliputi Arsitektur, Peta Rencana, Proses Bisnis, serta Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	<b>Bidang Egov</b>
						Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	<b>Bidang Egov</b>

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	-	-	Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral	-	Diskominfostandi Kota Bekasi
			Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Sektoral	-	Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital	III. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Bidang Statistik
			Ketersediaan Data Sektoral pada Perangkat Daerah Berbasis Digital		Persentase Ketersediaan Data Sektoral pada Perangkat Daerah Berbasis Digital	3. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Statistik
						Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral dalam Sistem Statistik Nasional (Sub Kegiatan Usulan)	Bidang Statistik
						Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Bidang Statistik
						Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Bidang Statistik
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral (Sub Kegiatan Usulan)	Bidang Statistik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	-	-	Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	-	Diskominfostandi Kota Bekasi	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Persandian di Lingkungan Pemerintah Daerah	-	Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	IV. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Bidang SANTIK	
			Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah		Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	4. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang SANTIK	
						Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Bidang SANTIK	
						Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Bidang SANTIK	
					Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi dan Pemenuhan Alat Pendukung Utama dan Wajib Persandian	Persentase Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi dan Pemenuhan Alat Pendukung Utama dan Wajib Persandian	5. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Bidang SANTIK
						Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Bidang SANTIK	

Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

**Tabel IV.3**  
**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Diskominfostandi Kota Bekasi**

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika															Diskominfostandi Kota Bekasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			-	18.178.622.020	-	18.221.768.487	-	19.276.558.654	-	19.688.582.643	-	20.270.522.496	-	20.752.770.073	Sekretariat
Outcome 1 : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	IP 1 : Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100%	25.000.000	100%	46.000.000	100%	104.123.812	100%	114.383.690	100%	125.364.294	100%	137.005.909	Sekretariat (Perencanaan)
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	100%	30 Dokumen	25.000.000	30 Dokumen	46.000.000	30 Dokumen	104.123.812	30 Dokumen	114.383.690	30 Dokumen	125.364.294	30 Dokumen	137.005.909	Sekretariat (Perencanaan)

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	10.000.000	9 Dokumen	20.500.000	9 Dokumen	23.000.812	9 Dokumen	25.009.690	9 Dokumen	27.012.294	9 Dokumen	29.005.909	Sekretariat (Perencanaan)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	21 Laporan	15.000.000	21 Laporan	25.500.000	21 Laporan	81.123.000	21 Laporan	89.374.000	21 Laporan	98.352.000	21 Laporan	108.000.000	Sekretariat (Perencanaan)

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Outcome 2 : Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	IP 2 : Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	89,27%	90%	16.336.795.020	90,73%	16.207.608.487	91,46%	17.137.000.000	92,19%	17.672.000.000	92,92%	18.190.000.000	93,65%	18.707.000.000	Sekretariat (Keuangan)
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	100%	93 Laporan	13.678.813.000	23 Laporan	14.572.119.000	23 Laporan	15.520.000.000	23 Laporan	16.025.000.000	23 Laporan	16.530.000.000	23 Laporan	17.035.000.000	Sekretariat (Keuangan)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1204 Orang/Bulan	1732 Orang/Bulan	13.668.813.000	2520 Orang/Bulan	14.557.119.000	2604 Orang/Bulan	15.500.000.000	2604 Orang/Bulan	16.000.000.000	2604 Orang/Bulan	16.500.000.000	2604 Orang/Bulan	17.000.000.000	Sekretariat (Keuangan)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17 Laporan	1 Laporan	10.000.000	22 Laporan	15.000.000	22 Laporan	20.000.000	22 Laporan	25.000.000	22 Laporan	30.000.000	22 Laporan	35.000.000	Sekretariat (Keuangan)

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	100%	43 Laporan	768.938.730	32 Laporan	864.899.487	35 Laporan	957.000.000	35 Laporan	967.000.000	35 Laporan	980.000.000	35 Laporan	992.000.000	Sekretariat (UmPeg)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	96.002.000	1 Paket	96.082.000	1 Paket	97.000.000	1 Paket	97.000.000	1 Paket	97.000.000	1 Paket	97.000.000	Sekretariat (UmPeg)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	391.470.000	3 Paket	370.000.000	5 Paket	400.000.000	5 Paket	410.000.000	5 Paket	420.000.000	5 Paket	430.000.000	Sekretariat (UmPeg)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	89.760.000	2 Paket	78.817.487	3 Paket	75.000.000	3 Paket	75.000.000	3 Paket	75.000.000	3 Paket	75.000.000	Sekretariat (UmPeg)

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	388 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	40.000.000	Sekretariat (UmPeg)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	36 Laporan	12 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000	Sekretariat (UmPeg)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	12 Laporan	111.706.730	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	300.000.000	Sekretariat (UmPeg)
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	23.000.000	1 Dokumen	25.000.000	Sekretariat (UmPeg)

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	100%	48 Laporan	1.889.043.290	13 Laporan	770.590.000	3 Laporan	660.000.000	3 Laporan	680.000.000	3 Laporan	680.000.000	3 Laporan	680.000.000	Sekretariat (UmPeg)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	36 Laporan	450.000.000	1 Laporan	450.000.000	2 Laporan	430.000.000	2 Laporan	450.000.000	2 Laporan	450.000.000	2 Laporan	450.000.000	Sekretariat (UmPeg)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	12 Laporan	1.439.043.290	12 Laporan	320.590.000	1 Laporan	230.000.000	1 Laporan	230.000.000	1 Laporan	230.000.000	1 Laporan	230.000.000	Sekretariat (UmPeg)

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Outcome 3 : Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	IP 3 : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	86,59	87	105.000.000	87,50	441.580.000	88	570.000.000	88,50	625.000.000	89	640.000.000	89,50	650.000.000	Sekretariat (UmPeg)
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan Usulan)	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	100%	1 Laporan	105.000.000	2 Laporan	441.580.000	3 Laporan	570.000.000	3 Laporan	625.000.000	3 Laporan	640.000.000	3 Laporan	650.000.000	Sekretariat (UmPeg)
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Sub Kegiatan Usulan)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	2 Paket	120.000.000	3 Paket	175.000.000	3 Paket	190.000.000	3 Paket	200.000.000	Sekretariat (UmPeg)

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  (Sub Kegiatan Usulan)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	14 Orang	105.000.000	20 Orang	150.000.000	20 Orang	150.000.000	20 Orang	150.000.000	20 Orang	150.000.000	20 Orang	150.000.000	Sekretariat (UmPeg)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  (Sub Kegiatan Usulan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	90 Orang	291.580.000	90 Orang	300.000.000	90 Orang	300.000.000	90 Orang	300.000.000	90 Orang	300.000.000	Sekretariat (UmPeg)

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Outcome 4 : Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	IP 4 : Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	1.711.827.000	100%	1.526.580.000	100%	1.465.434.842	100%	1.277.198.953	100%	1.315.158.202	100%	1.258.764.164	Sekretariat (UmPeg)
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  (Kegiatan Usulan)	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	100%	3 Laporan	611.827.000	2 Laporan	476.580.000	3 Laporan	435.000.000	2 Laporan	250.000.000	3 Laporan	315.000.000	2 Laporan	250.000.000	Sekretariat (UmPeg)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  (Sub Kegiatan Usulan pada APBD-P TA. 2025)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	350.000.000	-	-	2 Unit	60.000.000	-	-	2 Unit	65.000.000	-	-	Sekretariat (UmPeg)

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengadaan Mebel  (Sub Kegiatan Usulan)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	64 Unit	100.055.000	83 Unit	174.979.000	20 Unit	175.000.000	15 Unit	100.000.000	15 Unit	100.000.000	15 Unit	100.000.000	Sekretariat (UmPeg)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  (Sub Kegiatan Usulan)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20 Unit	161.772.000	24 Unit	301.601.000	15 Unit	200.000.000	15 Unit	150.000.000	15 Unit	150.000.000	15 Unit	150.000.000	Sekretariat (UmPeg)

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	3 Laporan	1.100.000.000	3 Laporan	1.050.000.000	3 Laporan	1.030.434.842	3 Laporan	1.027.198.953	3 Laporan	1.000.158.202	3 Laporan	1.008.764.164	Sekretariat (UmPeg)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	19 Unit	500.000.000	19 Unit	450.000.000	21 Unit	400.000.000	21 Unit	400.000.000	23 Unit	400.000.000	23 Unit	400.000.000	Sekretariat (UmPeg)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	548 Unit	85 Unit	200.000.000	100 Unit	200.000.000	100 Unit	130.434.842	100 Unit	127.198.953	80 Unit	100.158.202	80 Unit	108.764.164	Sekretariat (UmPeg)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	Sekretariat (UmPeg)

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			-	5.509.268.850	-	6.909.454.000	-	8.164.077.807	-	7.896.282.813	-	9.305.323.920	-	9.693.663.204	Bidang IKP
Outcome : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik	IP : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik	4,68	4,69	5.509.268.850	4,70	6.909.454.000	4,71	8.164.077.807	4,72	7.896.282.813	4,73	9.305.323.920	4,74	9.693.663.204	Bidang IKP
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	100%	5.509.268.850	100%	6.909.454.000	100%	8.164.077.807	100%	7.896.282.813	100%	9.305.323.920	100%	9.693.663.204	Bidang IKP

Bidang Urusan/ Program/Output/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Relasi Media	Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. terverifikasi Dewan Pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	2 Laporan	3.781.670.850	2 Laporan	3.675.406.000	2 Laporan	498.000.000	2 Laporan	198.000.000	2 Laporan	198.000.000	2 Laporan	198.000.000	Bidang IKP
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pemohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai Peraturan Perundang-an	200 Permohonan	200 Permohonan	911.349.000	100 Permohonan	200.000.000	200 Permohonan	500.000.000	200 Permohonan	350.000.000	200 Permohonan	550.000.000	200 Permohonan	500.000.000	Bidang IKP

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Rekomendasi Komunikasi terhadap Isu Publik yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	10 Rekomendasi	200.000.000	36 Rekomendasi	2.184.048.000	12 Rekomendasi	2.434.048.000	12 Rekomendasi	2.784.048.000	12 Rekomendasi	2.884.048.000	12 Rekomendasi	2.984.048.000	Bidang IKP
Diseminasi Informasi	Persentase Khalayak yang Terpapar Informasi Publik	100%	100%	331.585.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	Bidang IKP
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola maupun Pemanfaatan Media Berbayar sesuai Kriteria/Juknis	2 Media	1 Media	109.664.000	2 Media	300.000.000	3 Media	4.132.029.807	3 Media	4.064.234.813	3 Media	4.998.275.920	3 Media	5.386.615.204	Bidang IKP

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik  (Sub Kegiatan Usulan)	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	Bidang IKP
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang Difasilitasi Mengikuti bimtek/pelatihan	25 Orang	175 Orang	175.000.000	25 Orang	150.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	125.000.000	25 Orang	125.000.000	Bidang IKP

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			-	15.966.359.700	-	13.512.974.868	-	14.212.946.966	-	15.031.612.711	-	15.801.231.282	-	16.648.177.279	Bidang Egov & Bidang SANTIK
Outcome : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	IP : Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	4,21	4,21	15.966.359.700	4,98	13.512.974.868	4,98	14.212.946.966	4,98	15.031.612.711	4,99	15.801.231.282	4,99	16.648.177.279	Bidang Egov & Bidang SANTIK
Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK, Pusat Data dan Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	100%	100%	15.966.359.700	100%	13.512.974.868	100%	14.212.946.966	100%	15.031.612.711	100%	15.801.231.282	100%	16.648.177.279	Bidang Egov & Bidang SANTIK

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	3 Dokumen	3 Dokumen	205.530.000	3 Dokumen	246.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Egov
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	14.730.910.000	44 Perangkat Daerah	11.528.810.000	44 Perangkat Daerah	12.844.946.966	44 Perangkat Daerah	13.608.612.711	44 Perangkat Daerah	14.331.231.282	44 Perangkat Daerah	15.138.177.279		Bidang SANTIK
Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Operasional Pusat Kendali	1 Dokumen	1 Laporan	268.480.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	375.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	425.000.000		Bidang SANTIK

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam Rangka Interopabilitas Data dan Integrasi Layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	10 Aplikasi	10 Aplikasi	42.721.000	10 Aplikasi	46.320.000	10 Aplikasi	48.000.000	10 Aplikasi	48.000.000	10 Aplikasi	50.000.000	10 Aplikasi	50.000.000	Bidang Egov
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Laporan	198.469.700	1 Laporan	224.307.700	2 Laporan	230.000.000	2 Laporan	240.000.000	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	250.000.000	Bidang Egov

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola SPBE meliputi Arsitektur, Peta Rencana, Proses Bisnis, serta Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Tata Kelola SPBE meliputi Arsitektur, Peta Rencana, Proses Bisnis, serta Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	157.205.000	3 Dokumen	248.780.000	3 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	265.000.000	3 Dokumen	275.000.000	3 Dokumen	285.000.000	Bidang Egov
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	6 Program	6 Dokumen	363.044.000	6 Dokumen	868.567.168	6 Dokumen	490.000.000	6 Dokumen	495.000.000	6 Dokumen	495.000.000	6 Dokumen	500.000.000	Bidang Egov

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bidang Urusan Statistik															Diskominfo Standi Kota Bekasi
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			-	238.926.000	-	550.000.000	-	600.000.000	-	650.000.000	-	700.000.000	-	700.000.000	Bidang Statistik
Outcome : Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Sektoral	IP : Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital	3,75	4,38	238.926.000	5,00	550.000.000	5,00	600.000.000	5,00	650.000.000	5,00	700.000.000	5,00	700.000.000	Bidang Statistik
3. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Data Sektoral pada Perangkat Daerah Berbasis Digital	100%	100%	238.926.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	Bidang Statistik

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral dalam Sistem Statistik Nasional  (Sub Kegiatan Usulan)	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah mendapatkan Rekomendasi dari Pembina Data Statistik	-	-	-	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Bidang Statistik
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	1 Dokumen	100%	90.216.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	Bidang Statistik

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh Pengguna Data	1 Dokumen	100%	148.710.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Bidang Statistik
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral  (Sub Kegiatan Usulan)	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pelatihan di Bidang Statistik	-	-	-	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	150.000.000	10 Orang	150.000.000	Bidang Statistik

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bidang Urusan Persandian															Diskominfostandi Kota Bekasi
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi			-	1.070.188.000	-	5.126.524.897	-	3.783.500.000	-	4.723.500.000	-	3.778.500.000	-	4.083.500.000	Bidang SANTIK
Outcome : Meningkatkan Keamanan Siber dan Persandian di Lingkungan Pemerintah Daerah	IP : Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	5,00	5,00	1.070.188.000	5,00	5.126.524.897	5,00	3.783.500.000	5,00	4.723.500.000	5,00	3.778.500.000	5,00	4.083.500.000	Bidang SANTIK
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	100%	100%	1.007.098.000	100%	4.961.574.897	100%	3.580.000.000	100%	4.520.000.000	100%	3.575.000.000	100%	3.880.000.000	Bidang SANTIK

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	3 Laporan	59.152.000	2 Laporan	200.000.000	3 Laporan	240.000.000	3 Laporan	240.000.000	3 Laporan	250.000.000	3 Laporan	250.000.000	Bidang SANTIK
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	947.946.000	14 Perangkat Daerah	4.761.574.897	15 Perangkat Daerah	3.340.000.000	15 Perangkat Daerah	4.280.000.000	15 Perangkat Daerah	3.325.000.000	15 Perangkat Daerah	3.630.000.000	Bidang SANTIK

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan PAGU Indikatif Tahun												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	Target	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi Sandi dan Pemenuhan Alat Pendukung Utama dan Wajib Persandian	100%	100%	63.090.000	100%	164.950.000	100%	203.500.000	100%	203.500.000	100%	203.500.000	100%	203.500.000	Bidang SANTIK
Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Pemetaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	44 Perangkat Daerah	1 Kegiatan	63.090.000	1 Kegiatan	164.950.000	1 Kegiatan	203.500.000	1 Kegiatan	203.500.000	1 Kegiatan	203.500.000	1 Kegiatan	203.500.000	Bidang SANTIK
Total PAGU				40.963.364.570		44.320.722.252		46.037.083.427		47.989.978.167		49.855.577.698		51.878.110.556	Diskominfostandi Kota Bekasi

Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

#### **4.1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, program prioritas pembangunan daerah dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome yang perumusannya memperhatikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi. Program unggulan tersebut diperkenalkan dengan “Septa Program Kota Bekasi Keren”, yaitu 7 (*tujuh*) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren yang dimaknai sebagai gambaran rasa bangga atas kemajuan dan perkembangan kondisi Kota Bekasi yang semakin nyaman kotanya dan semakin sejahtera masyarakatnya sesuai dengan visi yang ditetapkan.

Ke-7 (*tujuh*) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren, antara lain :

1. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE SEHAT**);
2. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE CERDAS**);
3. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE HIJAU**);
4. Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (*TIK*) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERKARYA**);
5. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE MENARIK**);

6. Penguatan Kohesi Sosial dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERSINERGI**);
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERKINERJA**).

Diskominfostandi Kota Bekasi menunjukkan keterkaitan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2030 dan Konsistensi antar Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 pada **GERAKAN KOBE BERKINERJA**, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.4**  
**Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	Kegiatan : Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Subkegiatan : Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2030

*Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi*

#### 4.1.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Pencapaian Jabar Istimewa

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, selain melaksanakan prioritas pembangunan, Kota Bekasi juga berupaya untuk berkontribusi terhadap pencapaian Jabar Istimewa.

Diskominfostandi Kota Bekasi menunjukkan keterkaitan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mendukung Pencapaian Jabar Istimewa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.5**  
**Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Pencapaian Jabar Istimewa**

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	Kegiatan : Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Subkegiatan : Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Pencapaian Jabar Istimewa : Langkah Kaopat,  Ekonomi dan Tata Ruang Istimewa <i>(Pengembangan Lapangan Kerja Baru)</i>

Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

#### 4.1.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Pencapaian Asta Cita

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah maka Kota Bekasi melalui Perangkat Daerah akan berkontribusi terhadap kegiatan prioritas utama dan proyek strategis nasional (Lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029.

Diskominfostandi Kota Bekasi menunjukkan keterkaitan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mendukung Pencapaian Asta Cita, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.6**  
**Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Pencapaian Asta Cita**

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota  Subkegiatan : Relasi Media	Pencapaian Asta Cita PN1 : Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif dan Sehat Industri (BEJO'S)

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	<p>Kegiatan : Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE</p>	<p>Pencapaian Asta Cita PN2 : Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital</p> <p>Pencapaian Asta Cita PN3 : Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital</p> <p>Pencapaian Asta Cita PN7 : Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas</p>

Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

#### **4.1.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Stunting**

##### **4.1.4.1 Penanggulangan Kemiskinan**

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi yaitu terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Meskipun kemiskinan Kota Bekasi menunjukkan tren yang menurun, namun upaya terpadu diperlukan agar kemiskinan bisa dikurangi dan ditanggulangi.

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, Dinas Sosial telah memiliki aplikasi, dimana penempatannya berupa hosting/kolokasi pada Infrastruktur Pusat Data Pemerintah Kota Bekasi yang dikelola oleh Diskominfostandi Kota Bekasi serta/atau Pusat Data Nasional. Dalam hal ini, Dinas Sosial bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sumber daya, keandalan sistem maupun aplikasi, serta memastikan keamanan informasi dan keakuratan atau validasi datanya.

Diskominfostandi Kota Bekasi menunjukkan keterkaitan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mendukung Penanggulangan Kemiskinan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.7**  
**Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Penanggulangan Kemiskinan**

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	Kegiatan : Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Subkegiatan : Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Penanggulangan Kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2025-2030

Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

#### 4.1.4.2 Penanganan Stunting

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, angka persentase stunting yang tinggi menunjukkan adanya masalah serius dalam pemenuhan gizi pada anak-anak. Stunting pada dasarnya terjadi diakibatkan berbagai macam faktor tidak hanya persoalan gizi semata. Faktor lainnya disebabkan oleh usia dini pernikahan, lingkungan yang tidak sehat hingga pola asuh terhadap anak.

Diskominfostandi Kota Bekasi menunjukkan keterkaitan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mendukung Penanganan Stunting, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.8**  
**Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Penanganan Stunting**

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	Kegiatan : Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Subkegiatan : Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Penanganan Stunting Kota Bekasi Tahun 2025-2030

Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

#### 4.1.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Diskominfostandi Kota Bekasi dalam Mendukung Sasaran Prioritas Kota Bekasi

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Diskominfostandi Kota Bekasi mendukung Sasaran Prioritas Kota Bekasi yaitu **Gerakan Kobe Berkarya** dan **Gerakan Kobe Menarik**.

## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Diskominfostandi Kota Bekasi

Sasaran beserta Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan Indikator Kinerja Utama (*IKU*) Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 guna perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja, dengan perumusan sebagai berikut :

### **Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik**

{Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik + Nilai Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital} : 2

### **Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik**

Nilai Rataan Survey IKM (PermenPAN RB) yang dilakukan Persemester dalam 1 Tahun Anggaran x (5 Indeks)

#### **Hasil Survey**

Rumus Perhitungan :

- U1 s.d U9 = Unsur Pelayanan
- NNR = Nilai Rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- \*) = Jumlah NRR IKM Tertimbang
- \*\*) = Jumlah NNR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur =  $\frac{\text{Jumlah nilai perunsur}}{\text{Jumlah kuesioner yang terisi}}$
- NRR = NRR per unsur x 0,011

### **Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital**

Nilai Rataan{( Cakupan Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah + Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Pusat Data) + Persentase Jumlah Platform dengan Database yang Terintegrasi + Persentase Jumlah Layanan Digital PD)} x 5 (Indeks)

{Nilai Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital }

**Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital :**  
 $\frac{\text{Jumlah Data Sektoral pada PD Berbasis Digital}}{\text{Jumlah Data Sektoral pada PD}} \times 5$  (Indeks)

**Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi**

{(Persentase persentase penyediaan layanan keamanan informasi x 0,4)+ Persentase pelaksanaan keamanan informasi x 0,3) + Persentase penyelenggaraan jaring komunikasi standi dan pemenuhan alat pendukung dan utama persandian x 0,3):100}5 indeks

= **Persentase persentase penyediaan layanan keamanan informasi** (Jumlah pengukuran tingkat kematangan informasi + Jumlah Audit Reviuw Standarisasi ISO + Jumlah sertifikasi ISO + Jumlah Infrastruktur Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan fasilitas teknologi keamanan informasi +Jumlah insiden Keamanan Informasi yang dapat ditanggulangi dan dipulihkan ) + **Persentase pelaksanaan keamanan informasi** (Jumlah pengamanan sinyal + Jumlah aparatur yang menerbitkan sertifikasi elektronik + Jumlah aplikasi yang akan menggunakan sertifikasi elektronik(tanda tangan elektronik) ) + **Persentase penyelenggaraan jaring komunikasi standi dan pemenuhan alat pendukung dan utama persandian** = 100%

**Tabel IV.9**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029**

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks	4,45	4,84	4,85	4,85	4,86	4,86	Diskominfostandi Kota Bekasi
2	Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Indeks	4,38	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Diskominfostandi Kota Bekasi
3	Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Diskominfostandi Kota Bekasi

Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

#### 4.2.1 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Bekasi

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

**Tabel IV.10**  
**Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Bekasi**

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline	Target Tahun						PD Pengampu Bidang Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>										
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,01	3,34-3,69	3,55	3,12-3,40	2,98-3,27	2,83-3,11	2,73-3,02	Sosial, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perencanaan, Komunikasi dan Informatika, Kecamatan
<b>Aspek Daya Saing Daerah</b>										
13	Adopsi TIK	Nilai	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline	Target Tahun						PD Pengampu Bidang Urusan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>										
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	3,83	3,85	3,87	3,89	3,91	3,93	3,95	Komunikasi dan Informatika

Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan Diskominfostandi Kota Bekasi

#### 4.2.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Diskominfostandi Kota Bekasi

**Tabel IV.11**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK)**  
**Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029**

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik	Indeks	4,69	4,70	4,71	4,72	4,73	4,74	Bidang IKP
2	Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks	4,21	4,98	4,98	4,98	4,99	4,99	Bidang Egov & Bidang SANTIK
3	Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital	Indeks	4,38	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Bidang Statistik
4	Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	Indeks	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Bidang SANTIK

Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

### 4.3 Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Diskominfostandi Kota Bekasi dengan Asta Cita dan Jabar Istimewa

Diskominfostandi Kota Bekasi menunjukkan adanya Relevansi dan Konsistensi antar Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 berkenaan dengan Strategi dan Arah Kebijakan Diskominfostandi Kota Bekasi.

**Tabel IV.12**  
**Relevansi dan Konsistensi antar Tujuan dan Sasaran**  
**Diskominfostandi Kota Bekasi**

<b>Visi Kota Bekasi</b>	<b>Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera</b>		
<b>Misi Kota Bekasi</b>	<b>Mengembangkan Kolaborasi Strategis dan Dukungan Penguatan Manajemen Pemerintahan Kota yang Mendorong Kota Bekasi sebagai Kota Bertaraf Internasional yang Keren (Misi Ke-5)</b>		
<b>Tujuan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi</b>	<b>Sasaran RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi</b>	<b>Strategi Diskominfostandi Kota Bekasi</b>	<b>Arah Kebijakan RPJMD Kota Bekasi</b>
<i>Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi untuk Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas</i>	Meningkatnya Penyelenggaraan Komunikasi Informasi dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informatika dan Komunikasi dalam mendukung Perwujudan Dimensi Smart City	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di semua lini pelayanan publik;</li> <li>• Peningkatan kualitas dan jangkauan penerapan smart city;</li> <li>• Penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif berbasis TIK.</li> </ul>

Sumber : Diskominfostandi Kota Bekasi

**Tabel IV.13**  
**Program Dukungan Kota Bekasi terhadap Pencapaian Asta Cita**

<b>Kegiatan Prioritas Utama/Proyek Strategis Nasional</b>	<b>Program Kota Bekasi</b>	<b>Program Diskominfostandi Kota Bekasi</b>	<b>Kegiatan / Subkegiatan Diskominfostandi Kota Bekasi</b>	<b>Bidang Urusan</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
<b>Kegiatan Prioritas Utama</b>				
<b>PN 1</b>				
Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota  Subkegiatan Relasi Media	Komunikasi dan Informatika

<b>Kegiatan Prioritas Utama/Proyek Strategis Nasional</b>	<b>Program Kota Bekasi</b>	<b>Program Diskominfostandi Kota Bekasi</b>	<b>Kegiatan / Subkegiatan Diskominfostandi Kota Bekasi</b>	<b>Bidang Urusan</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
<b>PN 2</b>				
Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Komunikasi dan Informatika
<b>PN 3</b>				
Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Komunikasi dan Informatika
<b>PN 7</b>				
Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Komunikasi dan Informatika

Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

**Tabel IV.14**  
**Program Dukungan Kota Bekasi terhadap Pencapaian Jabar Istimewa**

<b>Jabar Istimewa</b>	<b>Program Kota Bekasi</b>	<b>Program Diskominfostandi Kota Bekasi</b>	<b>Kegiatan / Subkegiatan Diskominfostandi Kota Bekasi</b>	<b>Bidang Urusan</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Penyelenggaraan Pemerintahan Istimewa ( <i>Birokrasi Jujur, Bersih dan Melayani</i> )	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;  Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;  Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Seluruh Perangkat Daerah
Ekonomi dan Tata Ruang Istimewa ( <i>Lapangan Kerja Baru, Investasi, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Smart City</i> )	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Komunikasi dan Informatika

Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan Dokumen Perencanaan 5 (*lima*) Tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsinya serta berpedoman pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang bersifat Indikatif, yang menjadi Pedoman dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi untuk rentang waktu 5 (*lima*) Tahun serta sebagai Acuan dan Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan.

Sehubungan dengan Implementasi RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029, maka perlu untuk memperhatikan beberapa Kaidah Pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

1. Diskominfostandi Kota Bekasi berkewajiban untuk mengupayakan Pencapaian dan Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Dokumen RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi yang diselaraskan dengan Dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
2. Diskominfostandi Kota Bekasi berkewajiban menyusun RENJA Diskominfostandi Kota Bekasi setiap Tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Diskominfostandi Kota Bekasi dan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
3. Dalam rangka Efektifitas Pelaksanaan RENSTRA, Diskominfostandi Kota Bekasi berkewajiban melakukan Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan baik 5 (*lima*) Tahunan maupun secara berkala setiap Tahunnya.

Adapun Faktor Kunci Keberhasilan dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi khususnya terkait dengan Tujuan, Sasaran dan Program yang telah ditetapkan oleh Diskominfostandi Kota Bekasi pada

RENSTRA 2025-2029, antara lain sebagai berikut :

Meningkatkan Disiplin dan Profesionalisme Sumber Daya diantaranya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (*SDM*) Aparatur Diskominfostandi Kota Bekasi;
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana perkantoran yang memadai;
3. Penyediaan Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Sistem dan Prosedur yang memadai;
4. Meningkatkan Kualitas Perencana dan Aparatur lainnya dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah, serta Fungsional Diskominfostandi Kota Bekasi dalam menciptakan Inovasi yang berkualitas atau bermanfaat bagi Kota Bekasi;
5. Dukungan Ketersediaan Anggaran yang memadai dalam Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Diskominfostandi Kota Bekasi;
6. Pelayanan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfostandi Kota Bekasi secara Tanggap, Tepat, Professional dan Bermanfaat.

Pada pelaksanaannya diharapkan Dokumen RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dapat mendukung dan menjadi Pedoman dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfostandi Kota Bekasi selama 5 (*lima*) Tahun ke depan sehingga dapat mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan.

Bekasi, 19 September 2025

Ketua Tim Penyusun Renstra



**Drs. Nadih Arifin, M.Si.**